

UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke website www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh file "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format (PDF)* dan dapat dibaca menggunakan software Adobe Acrobat

EDISI 74/JANUARI-JUNI/2018



ARSIP

Media Kearsipan Nasional

INFRASTRUKTUR INDONESIA

ANRI MAJALAH ARSIP

INFRASTRUKTUR INDONESIA

EDISI 74/JANUARI-JUNI 2018



*Mitra Terpercaya
dalam Pengelolaan Arsip*



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selain sebagai pembina kearsipan nasional juga ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung kepada pencipta arsip dalam melaksanakan kewajiban mengelola arsipnya. Bantuan teknis tersebut tidak bersifat hibah melainkan melalui pembiayaan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu dibentuklah Pusat Jasa Kearsipan yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi:

- (a) Pembuatan pedoman kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
- (b) Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan;
- (c) Pembenahan arsip;
- (d) Pemeliharaan dan perawatan arsip;
- (e) Penyimpanan arsip.

Informasi Lebih Lanjut
Hubungi Pusat Jasa Kearsipan ANRI:
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta
12560 - Indonesia
Telp : +62 21 780 5851 / +62 21 781 5157 Ext. 403/506
Fax : +62 21 7810280 / +62 21 7805812
Email : pusat.jasa@gmail.com
www.jasakearsipan.anri.go.id

SUKSESKAN ASIAN GAMES 2018



Jakarta - Palembang,
18 Agustus - 2 September 2018

www.asiangames2018.id



DAFTAR ISI



5 PENYELAMATAN ARSIP INFRASTRUKTUR ; REKAM JEJAK DARI KERJA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Arsip infrastruktur yang tercipta harus selalu dipantau dan dimonitoring termasuk pemberkasannya. Hal ini perlu dilakukan agar arsip infrastruktur tidak tercecer dan memberkas dengan baik sehingga arsip tersebut nantinya akan sangat berguna bagi kepentingan penelitian di masa depan.

DARI REDAKSI ————— 4

WAWANCARA EKSKLUSIF ————— 14

MEMBANGUN INDONESIA SEHAT DENGAN PENGELOLAAN ARSIP SESUAI KAIDAH KEARSIPAN

PRESERVASI ————— 18

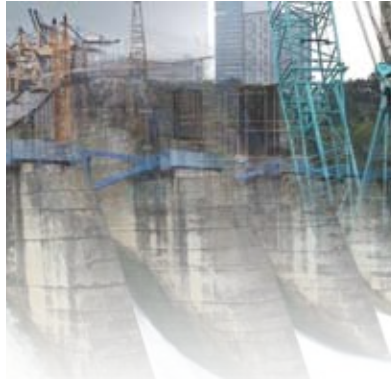
PRESERVASI ARSIP VIDEO TAPE BCN

PROFIL ————— 22

ROOSSENO: BAPAK BETON INDONESIA

DAERAH ————— 24

MENJAGA HAK KEPERDATAAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG DAN MENGENALKAN ARSIP PADA ANAK USIA DINI



8 PROYEKSI PENYELAMATAN ARSIP INFRASTRUKTUR INDONESIA

Tanpa arsip yang dapat kita baca, kita lihat dan kita dengarkan, tentu hanya cerita belaka bahwa sebuah era pemerintahan telah melakukan pembangunan demi rakyatnya, hingga pada akhirnya generasi yang akan datang hanya dapat melihat bangunan-bangunan beton itu dengan bisu, tanpa mengetahui “cerita” dan bagaimana proses pembangunan beton-beton tersebut.

MANCANEGARA ————— 27

NAMA BAYI OLIVIA DAN JACK PALING POPULER DI SCOTLANDIA MENURUT ANGKA YANG DITERBITKAN OLEH NATIONAL RECORDS OF SCOTLAND (NRS)

HUKUM ————— 30

KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM KEARSIPAN NASIONAL

VARIA ————— 33

PENGENALAN PROFESI ARSIPARIS MELALUI KELAS INSPIRASI YOGYAKARTA #6

CERITA KITA ————— 35

AKU DAN SENARAI MEMORI

LIPUTAN ————— 37



11 PENGEMBANGAN WILAYAH JABODETABEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BOGOR

Kota Bogor memiliki syarat untuk menjadi sebuah kota yang besar antara lain kondisi geografis dan sejarah. Kemudian karena letaknya yang dekat dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kota Bogor sangat strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan nasional, perdagangan, transportasi, dan pariwisata.



Cover Designer : Isanto

KETERANGAN COVER

Pembangunan proyek infrastruktur *Light Rail Transit* di dekat Velodrome Rawa Mangun, Jakarta (LRT)
Sumber : Humas, ANRI

Pembina:

Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Syaifuddin

Pemimpin Redaksi:

Gurandhyka

Wakil Pemimpin Redaksi:

Rosnarjo

Dewan Redaksi:

Azmi, Hilman Rosmana,
M. Ihwan,
Bambang Parjono Widodo,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian,
Susanti,
Mudanto Pamungkas

Editor:

Dhani Sugiharto,
Aria Maulana,
Rayi Darmagara,
R. Suryagung Sudibyo P,
Muhammad Rustam
Intan Lidwina
Annawaty Betawinda
Erieka Nurlidya

Fotografer:

Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Desain Grafis:

Beny Oktavianto
Isanto

Sekretariat:

Khoerun Nisa Fadillah,
Yuanita Utami,
Krestiana Evelyn

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id



Tim Redaksi

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat strategis bagi pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pembangunan, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Sejatinya pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan penciptaan arsip/dokumennya. Pembangunan infrastruktur idealnya dilengkapi dengan arsip pembangunan yang terdiri atas: Arsip Perencanaan, Arsip Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Arsip Pelelangan, Arsip Kontrak Kerja Konstruksi, Arsip mengenai info kesesuaian bangunan dengan rencana (*As Built Drawings*), dan Arsip Sertifikat Laik Fungsi/Operasi (SLF/SLO) sesuai ketentuan dan arsip lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur.

Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema Arsip Infrastruktur Indonesia yang meliputi bahasan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur dari masa ke masa, pemanfaatan arsip dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan arsip infrastruktur, dan penyelamatan arsip infrastruktur.

Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Varia, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi

PENYELAMATAN ARSIP INFRASTRUKTUR; REKAM JEJAK DARI KERJA Pemerintahan Jokowi-JK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar', kalimat ini acapkali kita dengar dalam berbagai kesempatan. Kebesaran bangsa Indonesia tidak hanya disuguhkan dalam skala geografis dan demografis, tetapi juga fakta sejarah perjuangan bangsa yang memperlihatkan bangsa Indonesia tetap bersatu hingga kini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika.

Untuk memenuhi janji kemerdekaan, maka pemerintahan Jokowi-JK bertekad menjaga kedaulatan negara, baik itu laut, perbatasan, maupun sumber daya alam. Ini terlihat dalam tahun pertama Kabinet Kerja, dimana pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris.

Pada tahun kedua, pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, meliputi pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Pada tahun ketiga, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya membangun Indonesia sentris dijabarkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara. 'Kita ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung, baik melalui udara, laut, maupun darat' demikian pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada tahun 2017, guna menjawab kenapa pembangunan infrastruktur transportasi digalakkan. Untuk itu Indonesia membangun

bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan dan jalan lintas perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua.

Adanya pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah setempat, terutama di kawasan pinggiran dan perbatasan. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai *Base Transceiver Station* (BTS) sehingga perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi. Pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan merupakan suatu kebutuhan, hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat Indonesia terutama yang berkaitan dengan sarana transportasi. Adanya pembangunan transportasi diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat perjalanan dan



Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan di hadapan DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia (Dok. Humas ANRI)

peningkatan di bidang ekonomi dan bidang lainnya.

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menekankan ketimpangan, bukan hanya soal ekonomi tetapi juga mempersatukan bangsa, demikian penjelasan Presiden Jokowi kenapa pembangunan infrastruktur digalakkan di era kepemimpinannya. Ditambahkan, bahwa ditargetkan 14 kawasan industri baru terbangun di luar Pulau Jawa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga bangsa Indonesia mampu memenangkan kompetensi antarnegara.

Tentunya, yang terpenting dari adanya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Kabinet Kerja harus terdokumentasikan, dapat dikelola dan tersimpan dengan baik dan selanjutnya dapat diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. Menurut Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, MPA, arsip infrastruktur yang tercipta harus selalu dipantau dan dimonitoring termasuk pemberkasannya. Hal ini perlu dilakukan agar arsip infrastruktur tidak tercecer dan memberkas dengan baik

sehingga arsip tersebut nantinya akan sangat berguna bagi kepentingan penelitian di masa depan.

Berbicara mengenai arsip infrastruktur, ANRI saat ini memiliki khazanah arsip pembangunan infrastruktur mulai jalan-jalan yang dibangun pada masa kolonial, seperti pembangunan sarana infrastruktur berupa jalan sepanjang 1.000 Km mulai dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Banten) sampai dengan Panarukan (Jawa Timur) yang dilakukan pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Deandies (1808 – 1811). Arsip tersebut masih terkelola dan tersimpan dengan baik, diharapkan dapat sebagai rujukan untuk memprediksi pembangunan-pembangunan jalan berikutnya.

Dalam penjelasannya, Kepala ANRI berharap setiap instansi pemerintah yang menciptakan arsip infrastruktur harus mampu mengelolanya dengan baik sehingga arsip tersebut dapat dijadikan bukti pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan aktivitasnya kinerjanya. Untuk itulah ANRI tetap mendorong setiap instansi

pemerintah memberi peluang seluas-luasnya kepada karyawan yang telah mengkhususkan pekerjaannya di bidang kearsipan untuk menjadi Arsiparis. Keberadaannya diharapkan dapat membantu terkelolanya arsip-arsip infrastruktur secara akurat dan lengkap, demikian paparan dari Mustari Irawan. Namun diakui, untuk pengelolaan arsip infrastruktur yang bersifat dinamis memerlukan ekstra perhatian karena pendokumentasian tersebut tidak hanya menjadi kewajiban instansi pemerintah saja tetapi juga melibatkan pihak ketiga (BUMN ataupun perusahaan swasta).

Dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan Pihak Ketiga yang menerima pekerjaan dari lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara kepada pemberi kerja. Itu artinya, pihak ketiga yang menerima pekerjaan infrastruktur pun wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pemberi kerja dan lembaga lain yang terkait, termasuk dalam pengelolaan arsipnya. Dalam Pasal 88 disebutkan pula, pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, sosialisasi tentang penyelamatan arsip infrastruktur hendaknya dilakukan terhadap pihak ketiga.

ANRI perlu melakukan pembinaan secara kontinu ke instansi-instansi

pemerintah dan pihak ketiga yang terlibat, terutama dalam hal pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan sehingga semua data arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang terkait dengan pengelolaan arsip infrastruktur itu dapat dipercaya, valid dan akurat.

Informasi arsip infrastruktur meskipun tidak termasuk arsip terjaga, kiranya bagi instansi-instansi tertentu yang mempunyai tanggungjawab mengelola dan membangun infrastruktur dalam era pemerintahan Kabinet Kerja menjadi informasi yang strategis. Itu artinya arsip infrastruktur yang tercipta dari instansi pemerintah memainkan peran penting dalam mengantisipasi masalah-masalah pembangunan sarana dan prasarana.

Arsip infrastruktur yang akurat, lengkap, dan termutakhirkan jelas menjadi acuan sebelum dikeluarkannya suatu *policy* untuk melanjutkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Keberadaannya merupakan bukti autentik, oleh karenanya pengelolaan terhadap arsip infrastruktur harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terintegrasi, dan satu sama lain saling melengkapi.

Berarti, upaya penyelamatan arsip infrastruktur merupakan cara untuk mendokumentasikan segala rekam jejak suatu kinerja yang dilakukan pada era pemerintahan Jokowi-JK. ANRI suatu lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tanggungjawab sebagai penyelenggara kearsipan nasional yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip hendaknya mulai sekarang perlu memprioritaskan upaya penyelamatan arsip-arsip infrastruktur sebagai bentuk komitmen pemerintah

“ arsip infrastruktur yang tercipta harus selalu dipantau dan dimonitoring termasuk pemberkasannya. Hal ini perlu dilakukan agar arsip infrastruktur tidak tercecer dan memberkas dengan baik sehingga arsip tersebut nantinya akan sangat berguna bagi kepentingan penelitian di masa depan ”



Kepala ANRI, Mustari Irawan


terhadap penyelenggaraan kearsipan.

Dengan tersimpannya arsip mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh bangsa Indonesia diharapkan dapat memberikan harapan, semangat dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kepala ANRI, Mustari Irawan, menambahkan bahwa dengan tersimpannya arsip-arsip mengenai pembangunan infrastruktur dalam bentuk film, foto, dan *drawing* memberikan gambaran kepada kita semua, terutama generasi penerus bangsa, bahwa bangsa kita pada masa sekarang ini sesungguhnya

merupakan bangsa yang giat bekerja mengisi pembangunan dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Arsip-arsip ini akan menjaga memori, identitas bangsa dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, arsip tersebut bukan hanya sekedar informasi, tetapi merupakan pengetahuan, arsip menjadi aset kekayaan bahan informasi juga ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat, ujar Mustari Irawan, yang saat ini sudah memasuki tahun kelima memimpin ANRI.

Di bawah kepemimpinannya, ANRI terus menggalakkan upaya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebagai upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya mengelola arsip. Arsip infrastruktur dengan segala kompleksitasnya merupakan arsip aset yang perlu diselamatkan dan dilestarikan, oleh sebab itu, salah satu target dari GNSTA ini adalah mendukung program/agenda Nawacita dari Pemerintahan Jokowi-JK yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur sebagai upaya menyelamatkan aset kekayaan intelektual bangsa untuk membangun industri strategis nasional.

Arsip infrastruktur sebagai salah satu aset bersejarah yang berisi informasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh suatu instansi baik itu di tingkat nasional maupun daerah bermakna bahwa arsip tersebut mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pada masa yang akan datang, mampu menunjang peran dan fungsi pemerintahan sebagai pemberi layanan publik sehingga mendukung terciptanya *good governance* dan *open government*. (BPW)



Rayi Darmagara

PROYEKSI PENYELAMATAN ARSIP INFRASTRUKTUR INDONESIA

Pemerintah dewasa ini memberikan porsi terbesar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di seluruh pelosok negeri dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan, pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda serta dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Dalam beberapa kesempatan presiden menyampaikan betapa pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa. "Tanpa infrastruktur, jangan mimpi negara ini bisa bersaing." Melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, telah ditetapkan secara garis besar 13 (tiga belas) jenis infrastruktur prioritas yang mencakup transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, sarana persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, pendidikan, kawasan, pariwisata, dan kesehatan.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diputuskan sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 2 program, yakni program kelistrikan dan program industri pesawat terbang. Pemerintah telah pula membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), setidaknya ada

beberapa kementerian dan lembaga yang berkecimpung dalam susunan keanggotaan KPPIP tersebut. Dari sudut pandang tingkat keberhasilan, berdasarkan *Global Competitiveness Index* tahun 2017 menunjukkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2017-2018 mencapai kenaikan yang saat ini berada di urutan ke-52 dari posisi sebelumnya di periode tahun 2015-2016 yang masih berada di posisi 62.

Dengan alokasi dana yang besar pada sektor infrastruktur, pengelolaan

atasnya harus dapat memastikan sumber-sumber pembiayaan yang telah digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan praktik-praktik pengelolaan keuangan negara yang sehat. Karena berasal dari rakyat, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan atas dana infrastruktur mutlak adanya. Transparansi dan akuntabilitas tercermin pada arsip yang tercipta, jika secara hukum (*de jure*) dalam peraturan presiden menjadi landasan pelaksanaan kegiatan oleh KPPIP. Maka secara fakta (*de facto*), keberadaan KPPIP harus dapat dirasakan dan dibuktikan berdasarkan arsip yang tercipta. KPPIP yang terdiri atas kementerian dan lembaga didalamnya harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik baik pada saat sekarang maupun mendatang melalui data kinerja (*performance data*) sebagai bukti akuntabilitas kinerja birokrasi. Data kinerja merupakan informasi

terekam dalam berbagai bentuk dan media yang tidak lain adalah arsip.

Hal ini pula yang memberikan bukti bahwa negara hadir dalam mengurus rakyatnya yang dibuktikan dengan arsip yang tercipta. Tanpa arsip yang dapat kita baca, kita lihat dan kita dengarkan, tentu hanya cerita belaka bahwa sebuah era pemerintahan telah melakukan pembangunan demi rakyatnya, hingga pada akhirnya generasi yang akan datang hanya dapat melihat bangunan-bangunan beton itu dengan bisu, tanpa mengetahui “cerita” dan bagaimana proses pembangunan beton-beton tersebut.

Jangan sampai, kisah sulitnya proses renovasi pembangunan jembatan ikonik Sumatera Selatan, Jembatan Ampera, yang disebabkan karena terseraknya arsip data spesifikasi bahan dan material pembangunan merupakan pengalaman yang berharga. Pengalaman tersebut menyadarkan kita bahwa pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan upaya-upaya preventif terkait dengan penyelamatan arsip pembangunan guna menjaga kepentingan *stakeholder* dimasa yang akan datang.

Belum lagi yang menjadi faktor utama hambatan infrastruktur adalah persoalan pertanahan, isu pembebasan lahan hingga kini masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur, menyumbang sebesar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Potensi sengketa pertanahan pada saat pembebasan lahan menjadi hal yang harus diperhitungkan sehingga dikemudian hari gugatan tentang tanah dapat teratasi dengan proses penyelamatan arsip pertanahan. Pemerintah memang dinilai berhasil

dalam membangun infrastruktur, tapi sebagai penanggungjawab bidang kearsipan, pemerintah melalui lembaga kearsipan harus pula melakukan langkah-langkah dalam penyelamatan arsip bidang infrastruktur.

Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Kearsipan

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi sehingga dapat mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah turut pula melibatkan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Dengan terlibatnya pihak lain (badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi), maka pencipta arsip dalam bidang infrastruktur mengalami perubahan komposisi dalam arti bahwa untuk mengetahui secara utuh infrastruktur Indonesia kedepannya, akuisisi arsip infrastruktur melibatkan banyak pencipta arsip. Mengutip Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri. Selain itu berdasarkan Pasal 57 ayat (2) undang-undang kearsipan, perusahaan swasta terhadap wajib melakukan

pengelolaan arsip dinamis terhadap arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri.

Tentu berdasarkan kenyataan tersebut, lembaga kearsipan perlu membentuk pemantauan/monitoring khusus terkait dengan proses pengelolaan arsip dinamis dari kegiatan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dalam upaya proses penyelamatan arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi. Lembaga kearsipan dituntut pula menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan dalam bidang infrastruktur.

Pemantauan/monitoring khusus tersebut dapat dilihat pada konteks banyaknya pencipta arsip yang mengurus urusan infrastruktur, paling tidak lembaga pencipta seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan lembaga terkait sebagai pencipta arsip bidang infrastruktur. Bagi Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh perangkat daerah atau dinas daerah juga menjadi pantauan/monitoring khusus bagi Lembaga Kearsipan Daerah.

Selain itu faktor lain yang perlu dilakukan yaitu pembentukan pengawas kearsipan internal yang melakukan pengawasan atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip dengan tujuan mendorong pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Aspek pengelolaan arsip dinamis, sumber daya manusia kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan pada lembaga pencipta arsip perlu dipersiapkan agar kesadaran penyelamatan arsip infrastruktur dimulai sejak dini/sejak penciptaan arsip, sehingga kegiatan kementerian, lembaga atau pemerintahan daerah yang banyak dan porsi anggaran yang besar terhadap pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan arsip yang tercipta.

Penyelamatan Arsip Bidang Infrastruktur

Penyelamatan arsip merupakan tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis. Penyelamatan arsip dilaksanakan pada konteks penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan yang disebut sebagai akuisisi arsip statis.

Penyerahan arsip mendorong pencipta arsip dalam hal ini kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur melakukan penataan arsip dinamisnya. Pencipta arsip tersebut harus segera “disadarkan” bahwa arsip pembangunan infrastruktur yang

“**Tanpa arsip yang dapat kita baca, kita lihat dan kita dengarkan, tentu hanya cerita belaka bahwa sebuah era pemerintahan telah melakukan pembangunan demi rakyatnya**”

diciptakan memiliki potensi besar masuk ke dalam kategori arsip statis yang memiliki nilai kesejarahan.

Proses penyerahan arsip statis melibatkan dua entitas lembaga, pertama adalah lembaga pencipta dan kedua adalah lembaga kearsipan. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dilakukan terhadap arsip yang: (a) memiliki nilai guna kesejarahan; (b) telah habis retensinya; dan/atau (c) berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip.

Dalam kaitan telah habis retensinya dan/atau berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip dalam peraturan pemerintah tersebut, secara konstruksi peraturan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa retensi arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa pedoman retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI bersama dengan lembaga teknis terkait. Dan penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa

yang dimaksud dengan “lembaga teknis terkait” adalah lembaga yang memiliki keterkaitan substansi urusan pemerintahan.

Telah ditetapkan 47 urusan pemerintahan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip. Jika dikaitkan dengan kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, untuk pedoman retensi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pertanahan, energi dan sumber daya mineral menjadi beberapa urusan pemerintahan yang masih belum terdapat pedoman retensinya, sehingga mendorong lengkapnya pedoman retensi bidang infrastruktur merupakan langkah awal dalam proses penyelamatan arsip infrastruktur Indonesia. Lebih jauh lagi bahwa cita-cita infrastruktur akan membangun dan membentuk peradaban bagi bangsa Indonesia ke depan, ditopang dengan kesiapan lembaga kearsipan dalam penyelamatan arsip bidang infrastruktur saat ini.

Betty Prasetyaning Darmasari

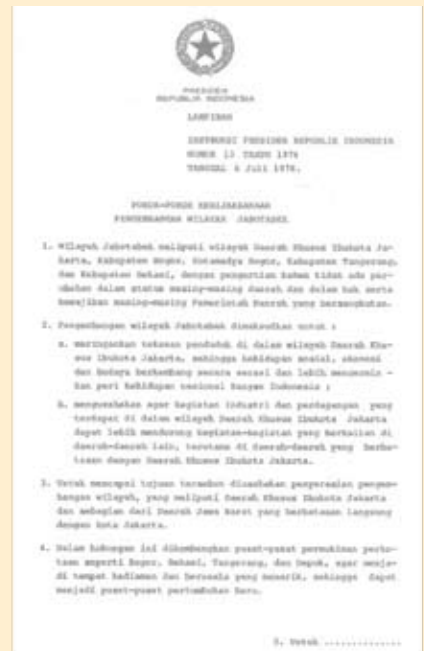
PENGEMBANGAN WILAYAH JABODETABEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BOGOR

Kota yang berpotensi untuk berkembang menjadi kota besar pada umumnya memiliki dua syarat, yaitu: kondisi geografisnya dan sejarah kota itu sendiri. Kota Bogor, yang secara geografis merupakan daerah pegunungan dan dilalui oleh dua sungai besar, sungai Ciliwung dan Cisadane, memiliki lahan subur. Ditambah dengan letaknya yang dekat dengan Jakarta menjadikan kota Bogor semakin strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pusat kegiatan nasional, perdagangan, transportasi dan pariwisata.

Secara historis Kota Bogor memiliki pengalaman yang panjang sebagai pusat aktifitas suatu pemerintahan sejak masa Kerajaan Pajajaran, Pemerintah Kolonial Belanda, Inggris hingga pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Prasasti Batu Tulis diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Kerajaan Pajajaran terletak di Kota Bogor. Ketika masa pemerintah kolonial Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Gustaaf Willem Baron van Imhoff membangun Istana Buitenzorg atau yang dikenal dengan Istana Bogor pada 1745. Kota Bogor semakin berkembang ketika Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels melintasi wilayah Kota Bogor.

Jabodetabek

Pasca kemerdekaan, Kota Bogor terus mengalami perubahan dan



Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabodetabek
Sumber: Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005, No. 12641, ANRI

perkembangan. Secara administratif Kota Bogor beberapa kali mengalami perubahan nama, yaitu Kota Besar Bogor (UU Nomor 16 Tahun 1950), Kota Praja Bogor (UU Nomor 1 Tahun 1957), Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (UU Nomor 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 tahun 1974) dan Kota Bogor (UU No. 22 Tahun 1999). Perubahan tersebut tentu saja diiringi dengan perkembangan dari berbagai macam sektor kehidupan.

Perkembangan Kota Bogor menjadi begitu pesat ketika tahun

1976 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tentang Pengembangan Wilayah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi. Pengembangan wilayah Jabodetabek dilatarbelakangi semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan di Ibukota Jakarta. Untuk mengurangi tekanan jumlah penduduk akibat hal tersebut maka dibuat pola pemukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara

KHAZANAH

lebih merata, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta agar menjadi tempat kediaman yang menarik.

Untuk keperluan itu diciptakan iklim yang dapat mendorong kegiatan investasi di wilayah Jabodetabek antara lain dengan pembangunan infrastruktur perhubungan, pengaturan penggunaan tanah, penciptaan lingkungan hidup yang sehat dan pengadaan berbagai sarana sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Dalam mempersiapkan perencanaan pengembangan Jabodetabek dibentuk Tim Perencanaan Jabodetabek yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pembangunan Pemukiman

Dampak dari Instruksi Presiden ini adalah meningkatnya kegiatan perdagangan dan bertambahnya pusat-pusat pemukiman perkotaan di Kota Bogor. Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas) berperan penting terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan di wilayah Jabodetabek. Selama empat kali Pelita (1979-1994), Perum Perumnas telah membangun sebanyak 122.952 unit rumah di kawasan Jabodetabek. Di Kota Bogor sendiri dibangun beberapa perumahan antara lain Perumnas Bantarjati I pada tahun 1980 berjumlah 936 unit dan Perumnas Bantarjati II yang dibangun tahun 1989 sebanyak 700 unit. Pada tahun 1990 dibangun Perumahan Indraprasta I dan Indraprasta II.

Kawasan perumahan lain yang relatif baru adalah di kawasan Bogor bagian Timur sampai dengan Tajur seperti perumahan Villa Duta dan Bogor Nirwana Residence (BNR). Pihak pengembang merencanakan perumahan ini untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Penduduk perumahan ini sebagian besar bekerja di Jakarta dan menggunakan kendaraan pribadi melalui akses jalan tol Jagorawi.



Perumahan Nasional Bantarjati, November 1987
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor



Perumahan Villa Duta, Januari 1987
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor

Pembangunan Jalan

Dalam perkembangan suatu kota, jaringan jalan merupakan unsur yang sangat menentukan. Sebelum maraknya pusat-pusat pemukiman pasca pengembangan wilayah Jabodetabek, jaringan jalan di Kota Bogor bisa dikatakan masih sederhana. Ini dapat dilihat dari Peta yang dibuat Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum

dan Tenaga Listrik (PUTL) pada Tahun 1969. Departemen PUTL kemudian merencanakan penambahan beberapa jaringan jalan di dalam Kota Bogor (Bogor By Pass) antara lain dari Sukasari ke Kedung Halang dengan panjang 6,5 km. Penambahan jaringan jalan utama mengakibatkan munculnya jalan-jalan penghubung ke pusat pemukiman atau perumahan-perumahan.



Peresmian Jalan Raya Bogor (sekarang jalan Jendral Sudirman), 4 Juni 1975
 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor



Peta Rencana Jaringan Jalan Tambahan Jakarta-Bogor (Bogor By Pass)
 Sumber: Inventaris Arsip Departemen Pekerjaan Umum 1950-2004, No. 380, ANRI



Jalan Tembus Sindangbarang ke Jalan Dr Semeru, November 1988
 Jalan yang dibangun sebagai salah satu upaya Pemerintah Kodya Bogor untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor

Kemudian pada 1975, diresmikan Jalan Raya Bogor sebuah jalan utama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor sebelum dibangunnya Jalan Tol Jagorawi. Jalan sepanjang sekitar 45 kilometer ini melintasi Kotamadya Jakarta Timur, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Baru pada tahun 1978 diresmikan jalan tol pertama di

Indonesia yaitu Jalan Tol Jagorawi kependekan dari Jakarta-Bogor-Ciawi.

Jalan tol ini membuat semakin mudah akses dan mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta ke Kota Bogor. Hal ini membuat Kota Bogor menjadi salah satu tujuan favorit untuk

pemukiman dan pariwisata. Akibatnya adalah semakin padatnya jumlah kendaraan di Kota Bogor. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sejumlah pembangunan jalan baru, salah satunya adalah jalan tembus Sindangbarang ke Jalan Dr. Semeru. Panjang jalan di Kota Bogor terus mengalami peningkatan yaitu sekitar 140.05 km pada tahun 1988 menjadi 183.76 km pada tahun 1993.

Kesimpulan

Tidak dipungkiri bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan infrastruktur seperti pemukiman dan jalan raya di Kota Bogor. Pembangunan tersebut merupakan jawaban dari konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk yang bermigrasi dari Jakarta ke Kota Bogor atau sebaliknya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Kota Bogor telah berhasil mencapai tujuan dari kebijakan pengembangan wilayah Jabodetabek yaitu menjadi pusat pertumbuhan baru selain Ibukota Jakarta.

WAWANCARA EKSKLUSIF DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
NILA MOELOEK

MEMBANGUN INDONESIA SEHAT DENGAN PENGELOLAAN ARSIP SESUAI KAIDAH KEARSIPAN

Masalah Kesehatan selalu menjadi perhatian publik, terutama ketika ada status KLB (Kejadian Luar Biasa) seperti saat terjadi KLB difteri beberapa waktu lalu. Sebelumnya kasus flu burung dan flu babi juga sempat menjadi fokus perhatian masyarakat Indonesia. Pada saat terjadi KLB, sudah menjadi tugas Kementerian Kesehatan untuk mengatasi kondisi ini agar penyakit tersebut tidak semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa. Pada KLB difteri misalnya, tindakan yang segera diambil adalah dengan melakukan ORI (Outbreak Response Immunization) di daerah-daerah tertentu yang mengalami KLB.

Menurut salah satu media, Indonesia pada tahun 2017 masih berada pada posisi 101 dari 149 negara dalam indeks kesehatan global 2017. Arsip kesehatan di Indonesia yang utuh dan lengkap memegang peran penting sebagai salah satu upaya dalam mencegah terulangnya kembali penyakit tersebut terjadi di Indonesia sebagaimana yang dikatakan Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam wawancara dengan tim majalah Arsip.

Berikut hasil wawancara eksklusif Tim Majalah ARSIP dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengenai Arsip Kesehatan di Indonesia.

Selama masa kepemimpinan Ibu Menteri, program prioritas apa saja yang sudah dilaksanakan dan dapat dirasakan kemanfaatannya terhadap masyarakat Indonesia?

Selama periode tahun 2015-2017, Kementerian Kesehatan senantiasa berusaha lebih baik melakukan upaya-upaya mewujudkan Indonesia sehat.

Capaian kinerja program yang diberikan kepada masyarakat diantaranya, pertama, melindungi

bayi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, tetanus, polio. Pada tahun 2015 sebanyak 4.1 juta bayi sudah diimunisasi dan pada 2016 meningkat menjadi 4.3 juta bayi. Kedua, sesuai hasil Pemantauan Status Gizi (PSG), angka balita *stunting* (kerdil) berhasil diturunkan dari 29% pada 2015 menjadi 27.5% pada 2016. Angka ini terus diupayakan turun dengan pemenuhan gizi seperti melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT bagi ibu hamil dan Balita).

Kemudian ketiga, pengendalian penyakit malaria melalui pemberian kelambu di daerah endemis dan pengobatan dengan ACT (Arthemisinin-based Combination Therapy) juga berhasil menurunkan angka kesakitan malaria. Sampai Oktober 2017, sebanyak 266 kabupaten/kota bebas dari malaria.

Keempat, melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), akses masyarakat terhadap sanitasi semakin meningkat dimana pada 2015 yaitu 56.08%, pada sampai triwulan II 2017 meningkat menjadi 69.13%.

Kelima, pemerintah juga terus berkomitmen memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan melalui pembayaran iuran bagi peserta JKN (PBI). Pada 2015 s.d. 2017 jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus meningkat, yaitu 2015 sebanyak 87.8 juta jiwa, 2016 sebanyak 91.1 juta jiwa, dan Desember 2017 sebanyak 92.3 juta jiwa.

Keenam, untuk memenuhi tenaga kesehatan di daerah, selain

penempatan tenaga Nusantara Sehat berbasis tim ke daerah terpencil dan kepulauan terluar, upaya pemenuhan SDM Kesehatan juga dilakukan melalui Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang telah dimulai sejak awal tahun 2017. Dokter spesialis kandungan, anak, bedah, penyakit dalam, dan anastesi wajib melakukan pengabdian selama 1 tahun di daerah yang telah ditentukan. Hingga kini sebanyak 870 dokter spesialis telah mengikuti program WKDS ini. Ketujuh, untuk memenuhi pelayanan kesehatan di daerah perbatasan, Kemenkes telah membangun 124 Puskesmas di 48 kab/kota perbatasan di 15 Provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi.

Waktu itu Indonesia sudah mencapai beberapa target *Millennium Development Goals* (MDG). Saat ini kita sudah masuk ke *Sustainable Development Goals* (SDG) dimana ada target MDG bidang kesehatan yang belum tercapai, seperti angka kematian ibu dan anak, termasuk penyakit menular dan akses air bersih. Presiden Jokowi pernah menanyakan mengapa AKI (Angka Kematian Ibu) kita masih tinggi? jadi tentu tugas kami adalah menurunkan Angka Kematian Ibu.

Kami berpikir sebenarnya SDG yang merupakan kelanjutan dari MDG itu mengambil hanya satu goals saja yaitu kesehatan secara menyeluruh atau secara siklus kehidupan dari bayi sampai manula. Artinya bukan hanya kematian ibu. Kami mulai berpikir kalau peningkatan kesehatan mulai dari ibu sepertinya sudah terlambat. Oleh karenanya, remaja memiliki posisi penting. Remaja perlu mengerti benar tentang bagaimana dia nanti merencanakan berkeluarga sehingga menghasilkan generasi ke depan yang berkualitas. Harus berpikir holistik dari mulai remaja sampai ke manula. Kita melakukan upaya preventif promotif. Artinya, di Puskesmas -- di pelayanan fasilitas kesehatan primer -- harus menjaga masyarakat agar tetap sehat, bukan di rumah sakit. Jika memang harus ke rumah sakit, kita harus kuatkan juga layanan kesehatan fasilitas kesehatan di rumah sakit tapi dengan sistem rujukan. Jadi benar-benar di-*screening* dulu.

Kementerian Kesehatan dapat

bekerja dengan baik melalui tata kelola kearsipan. Hal ini penting sekali bagi kami, artinya lintas kementerian/ lembaga harus saling terkait.

Apakah program-program prioritas itu sesuai dengan arsip/dokumen perencanaan yang telah disusun oleh tim Ibu Menteri?

Ya, tentu saja. Setiap program yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan harus tertuang dalam dokumen perencanaan, baik jangka panjang, seperti Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 maupun jangka pendek/tahunan, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan. Target dan sasaran yang telah tertuang dalam dokumen tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam penganggaran.

Dalam menjalankan program prioritas tersebut adakah hambatan atau kendala yang dihadapi? dan bagaimanakah solusi yang diambil?

Contoh yang masih hangat dalam ingatan yaitu munculnya komunitas anti vaksin yang menghambat program imunisasi di Indonesia. Upaya yang dilakukan memberikan sosialisasi yang masif dan edukasi kepada masyarakat, termasuk menggandeng atau bekerja sama dengan komunitas keagamaan.

Tantangan lain adalah mengubah paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Meskipun saat ini Jaminan Kesehatan Nasional membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tetapi hal ini tidak boleh disalahartikan. Masyarakat perlu dicegah dari sakit dan mengalami ketidakmampuan (disabilitas), sehingga tetap produktif dan tentunya berkontribusi untuk pembangunan bangsa.

Inovasi apa saja yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih sehat?

Sebagai salah satu upaya mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, dalam hal peningkatan akses imunisasi, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan melalui SOS (*Sustainable Outreach Services*) dan DOFU (*Drop Out Follow Up*) serta *sweeping* imunisasi terintegrasi

dengan program keluarga sehat. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga fokus pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat akan menentukan derajat kesehatan masyarakat karena dalam keluarga perilaku individu dibentuk, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat.

Kegiatan PIS-PK yang dilakukan antara lain, pertama, kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data Profil Kesehatan Keluarga dan peremajaan (*updating*) data.

Kedua, kunjungan keluarga sebagai upaya promotif dan preventif. Ketiga, kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung. Keempat, pemanfaatan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga untuk pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas.

Dalam mengambil sebuah keputusan tentunya diperlukan data-data yang tertuang dalam arsip yang akurat dan terpercaya. Menurut Ibu Menteri, seberapa pentingkah peranan arsip dalam mengambil keputusan/ kebijakan?

Sangat penting, seperti kita ketahui menurut Undang-undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip mempunyai peranan yang penting karena merupakan sumber informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan oleh setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian suatu kegiatan.

Penyelenggaraan kearsipan yang baik dapat menjamin arsip

sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan bahan akuntabilitas kinerja maupun dapat menjadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan/kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Tentu menurut saya arsip ini penting, kelemahan bangsa kita ini memang dalam hal dokumentasi. Dokumentasi menurut saya sangat penting, walaupun pada kenyataannya mungkin saat ini tidak terlihat penting. Tidak menutup kemungkinan pada beberapa tahun mendatang jika ada kejadian sehingga diperlukan pemeriksaan dan dipertanyakan atas penandatanganan dokumen oleh pimpinan kementerian. Jika tidak didukung oleh arsip yang memadai maka akan menimbulkan permasalahan pada pimpinan terkait. Karena itu menurut saya dokumen arsip penting sekali.

Saya berterimakasih pada ANRI, Kementerian Kesehatan dibina untuk memperbaiki kearsipannya, mana yang patut disimpan mana yang tidak disimpan tentu ada caranya, kekhususan mana yang perlu disimpan dan sampai berapa lama juga saya bisa mengerti. Dengan dunia digital saya kira sekarang bisa lebih banyak arsip yang disimpan dengan baik, sebagai bukti dokumentasi.

Salah satu contoh dulu kita pernah heboh dengan kasus flu burung. Tentu itu harus ada arsipnya. Bagaimana cara kita mengatasinya, apa yang terjadi dan sebagainya. Saya juga melihat ke depan memang perlu waspada. Artinya penyakit sekarang dengan berbagai macam virus, mungkin kita tidak lagi meributkan penyakit flu burung, namun sekarang yang saya khawatir misalnya virus onta, MERS-CoV, karena begitu banyaknya jemaah umroh, jemaah haji dan itu ada di Timur Tengah. Atau kita takut ebola yang terjadi di Afrika.

Jadi memang kearsipan yang lampau itu dapat kita pelajari kembali jika kita mengalami sesuatu, dalam hal ini penyakit yang pernah timbul. Hal-hal seperti itu harus menjadi catatan dan tersimpan dalam dokumentasi apa saja yang pernah terjadi di negara kita ini yang patut kita perhatikan betul.

“Dengan arsip kita bisa membuat suatu perencanaan yang baik dan mengambil keputusan yang baik juga”

Adakah kebijakan Ibu Menteri terkait dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan?

Kementerian Kesehatan telah mempunyai 4 Pilar Kebijakan Kearsipan yaitu, pertama mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1538 Tahun 2011. Kedua, kebijakan mengenai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/377/2016 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan pengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 198/MENKES/SK/VI/2012.

Ketiga, Kementerian Kesehatan telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/96/2017 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan pengganti:

a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/MENKES/SK/VI/2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Kesehatan.

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1414/MENKES/SK/ XII/2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Departemen Kesehatan

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 030 Tahun 2012 tentang JRA Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2016

tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

Dalam mendukung Program Nasional ANRI yaitu Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), telah dilaksanakan penancangan GNSTA oleh saya selaku Menteri Kesehatan bersama Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan disaksikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017 di Auditorium Siwabessy Kementerian Kesehatan.

Diharapkan setelah penandatanganan komitmen GNSTA ini para Pejabat Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan dapat mewujudkan GNSTA melalui 9 (sembilan) langkah. Adapun kesembilan langkah tersebut adalah pertama, penciptaan naskah dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penggunaan Aplikasi *Electronic Filing System* (EFS) untuk pengelolaan persuratan.

Ketiga, pemberkasan Arsip Aktif dilakukan pada *Central File* serta melaporkan Daftar Arsip Aktif setiap 6 (enam) bulan ke Unit Kearsipan.

Keempat, pelaksanaan Program Arsip Vital dan Arsip terjaga serta melaporkan Daftar Arsip Vital dan Arsip Terjaga ke Unit Kearsipan. Kelima, mengusulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ditugaskan menjadi Pemangku Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan Analisis Beban Kerja.

Keenam, melakukan Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah/Satuan Kerja Ke Unit Kearsipan secara berkala. Ketujuh, melakukan Pemusnahan Arsip yang telah habis Masa Retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedelapan, melakukan Penyerahan Arsip Statis yang ada ke Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Unit Kearsipan Kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir yang kesembilan, melakukan Pengawasan Kearsipan secara berjenjang.

Hal tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan



Penandatanganan komitmen pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Menteri Kesehatan, Nila Moeloek disaksikan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan. Penandatanganan dilaksanakan pada 5 Mei 2017 di Auditorium Siwabessy, Kementerian Kesehatan. (Dok. HM. ANRI)

Nomor HK.02.01/ MENKES/231/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengelolaan Kearsipan pada Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut juga telah dikeluarkan Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor A3.04/VII/3043/2017 tanggal 6 Oktober 2017 kepada para Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, diharapkan semua Satuan Kerja (Satker) baik Pusat maupun Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan dapat menyediakan Anggaran pada tahun 2018 untuk Kegiatan Pengelolaan Kearsipan (Sarana & Prasarana, Pertemuan Kearsipan, Penataan & Penyusutan Arsip dan Monitoring & Evaluasi Kearsipan) dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kearsipan (termasuk Jabatan Fungsional Arsiparis).

Apa harapan Ibu Menteri terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan?

Saya berharap Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan Pengelolaan Kearsipan dengan baik sehingga arsip yang tercipta dapat

menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan/ kebijakan dalam bidang kesehatan. Selain itu diharapkan arsip yang tercipta di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan arsip yang autentik dan dapat dipercaya sehingga dapat menjadi bahan akuntabilitas kinerja serta alat/ bahan pembuktian yang sah di pengadilan.

Untuk mencapai hal tersebut, saya menginstruksikan semua Satker baik Pusat maupun Satker UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mengelola arsip dinamis dengan baik sesuai peraturan perundangan mulai dari penciptaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai dengan penyusutan arsip.

Untuk mengelola arsip dinamis dengan baik semua Satker Pusat maupun Satker UPT harus mempunyai *Central File* untuk mengelola arsip aktif. Sedangkan untuk pengelolaan arsip inaktif diperlukan *Records Center* secara berjenjang mulai dari Unit Kearsipan pada Satker UPT, Unit Kearsipan Unit Utama serta Unit Kearsipan Kementerian. Sehingga tidak ada lagi ditemukan penumpukan berkas di ruang kerja maupun di gudang.

Dengan arsip kita bisa membuat suatu perencanaan yang baik dan

mengambil keputusan yang baik juga. Setelah itu kita bisa mengkaji riwayat/ sejarah perjalanan kesehatan dari suatu penyakit.

Ketika revolusi industri, muncul penyakit pes di Inggris diikuti penyakit cacar. Kemudian dari timbulnya penyakit cacar dibuatlah vaksin sehingga penyakit cacar bisa dicegah dengan imunisasi.

Kapan hilangnya cacar di Indonesia? Kapan kita berhasil memberantas penyakit tersebut? Sebagai contoh negara lain, yaitu Amerika sebagai negara maju dengan penyebaran cacar hanya sampai 10 tahun saja. Bandingkan dengan negara kita yang lebih dari 10 tahun? Berapa kerugian yang timbul akibat keterlambatan pencegahan penyakit cacar ini? Artinya dikatakan arsip sangat penting saya bisa mengatakan iya, kalau ada penemuan vaksin yang baru sebenarnya harusnya kita pakai, contoh tentang differi, berapa kerugian yang harus kita derita akibat ini? Jadi disinilah letak pentingnya arsip. Banyak yang bisa didokumentasikan dari setiap kejadian, mulai dari kapan kita mulai pengobatan, vaksin yang digunakan, program yang dilakukan dan semua itu ada di arsip.(SS)

Parno Nusantara

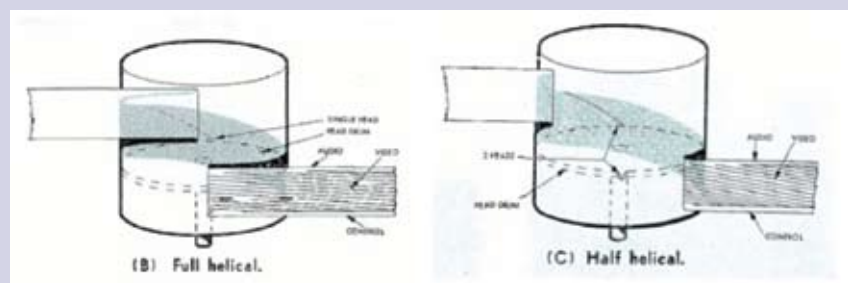
PRESERVASI ARSIP VIDEO TAPE BCN

Preservasi arsip statis sebagaimana Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2011 dilakukan secara kuratif dan preventif. Secara preventif preservasi arsip statis diantaranya dilakukan melalui penyimpanan serta alih media. Penyimpanan dilakukan untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik arsip sedangkan alih media dilakukan dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan informasi arsip. Diantara arsip yang tersimpan pada Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 387 Tahun 2016 adalah khasanah arsip video tape BCN. Video tape BCN merupakan media simpan arsip audio visual dalam bentuk kaset seperti halnya Betamax, Betacam, U-matic dan sebagainya yang memerlukan peralatan khusus untuk memutarinya. Adapun pengertian videotape BCN secara teknis adalah tipe format kaset video tape magnetik yang terdiri dari partikel-partikel yang bersifat magnet pada *tape polyester*.

Jenis format ini disebut "open reel" karena pita magnetik tidak dibungkus seperti kaset plastik. Beberapa jenis video tape open reel diantaranya Open Reel 2" (1956 - awal 1980an), Open Reel 1" (tahun 1963- pertengahan 1990an) serta Open Reel ½" (tahun 1965 - awal 1990an).

Pada masanya, video tape BCN merupakan media simpan audio visual yang digunakan secara profesional oleh stasiun televisi. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh video tape BCN diantaranya adalah dapat merekam suara dan gambar pada

satu pita dengan durasi penyimpanan yang lebih lama. Selain itu video BCN merupakan jenis media rekam video berwarna yang dapat digunakan dalam dunia televisi pada saat itu meskipun masih dalam format analog. Akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu, video tape BCN memiliki kekurangan yaitu memerlukan alat pemutar khusus sehingga tidak bisa diputar pada jenis *player* dengan merk yang berbeda. Selain itu, perlu dilakukan *reformatting* secara menyeluruh ketika adanya perubahan alat pemutar meskipun dengan merk yang sama.



sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Type_B_video_tape
Gambar.1 Perbedaan video tape open reel 1" tipe B dan C

Khazanah arsip video tape BCN yang tersimpan di ANRI sudah berumur ± 37 tahun yaitu sejak diterimanya arsip tersebut dari TVRI pada tahun 1979-1980 sebanyak 5006 kaset dengan format 1" dan 2". Penyimpanan dilakukan dengan suhu 18C + 20C dan kelembaban 35%RH + 5% untuk arsip media magnetik sebagaimana Perka ANRI No.23 Tahun 2011 tentang pedoman preservasi arsip statis. Sebagaimana pedoman preservasi tersebut, preservasi yang dilakukan termasuk diantaranya adalah alih media. Sementara itu, restorasi dapat dilakukan apabila memiliki peralatan restorasi yang sesuai dengan cara dengan memutarnya secara berkala pada alat pemutar yang sesuai dengan jenis video tapenya. Oleh karena keterbatasan peralatan restorasi, maka preservasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan alih media melalui digitalisasi yang secara tidak langsung melalui proses restorasi ketika video tersebut diputar. Digitalisasi dilakukan sebagai upaya untuk dapat membaca arsip videotape BCN tersebut supaya informasinya dapat diolah dan dilayankan kepada masyarakat. Kegiatan digitalisasi dilakukan dimulai dengan mengidentifikasi arsip video tape BCN yang disimpan. Berikut adalah contoh identifikasi yang telah dilakukan pada Tahun 2017 oleh

Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan alih media arsip video tape BCN 1" sebanyak 220 reel. Identifikasi yang dilakukan meliputi pengamatan jenis, tahun produksi dan merek dagang, durasi (masa putar), kondisi fisik, serta hal-hal yang berhubungan dengan perawatannya.

Jenis videotape BCN 1"

Video tape Open Reel 1" diperkenalkan oleh Philips pada tahun 1963 dengan menggunakan EL3400 scan recorder. Open Reel 1" adalah format video analog berbasis tape magnetik, yang digunakan sebagai format video profesional dengan lebar tape 1". Tape terdiri dari partikel magnetik, binder/pengikat, dan polyester base. Container/wadah tape umumnya terbuat dari plastik atau kadang-kadang dari kardus berbentuk segi empat serta memiliki satu sisi melengkung dengan pegangan. Container open reel yang digunakan untuk siaran televisi biasanya memiliki label besar yang berisi judul program, tanggal siaran, tanggal perekaman, dan/atau informasi lainnya.

Dari 220 video tape open reel 1" yang diidentifikasi, diketahui bahwa 164 video merupakan Open Reel 1" tipe B dan 56 video adalah open reel 1" tipe C. Perbedaan tipe B dan C dapat diketahui dengan melihat sisi tape

yang mengarah keluar. Apabila sisinya mengkilap/glossy maka termasuk tipe B, sedangkan sebaliknya bila tidak mengkilap/dop, maka termasuk tipe C. Perbedaan tersebut dapat diamati sebagaimana terlihat pada gambar 1 dimana terlihat bahwa sisi mengkilap merupakan *basefilm poliester*, sedangkan yang tidak mengkilap berisi video dan audio berupa lapisan pita magnetik yang mengandung campuran partikel magnetik yang kompleks, binder/pengikat, lubricant/pelumas, *head cleaning agent*/pembersih head, surfaktan, dan bahan kimia khusus lainnya.

Dari identifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa 164 video tape open reel 1" tipe B merupakan VTR BCN yang dimodifikasi khusus untuk bisa memutar ulang film dengan kecepatan dua kali tipe normal. Tipe B sendiri merupakan norma siaran yang dipakai di sebagian besar benua Eropa pada tahun 1980an. Sementara itu videotape Open Reel 1" tipe B di ANRI yang telah diidentifikasi merupakan produksi tahun 1979 – 1991. Berbeda halnya dengan video tape open reel tipe B, video tape dengan format open reel 1" tipe C mulai diperkenalkan pada tahun 1976-1978. Format ini memperkenalkan fitur bolak-balik yang dapat diputar dengan kecepatan

No.	Merek	Tipe B (reel)		Tipe C		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BASF	115	70,1 %	2	3,6 %	117	53,2%
2	SCOTCH	19	11,6 %	1	1,8 %	20	9,1%
3	AGFA	13	7,9 %	-	-	13	5,9%
4	AMPEX	16	9,8 %	53	94,6 %	69	31,4%
5	SONY	1	0,6 %	-	-	1	0,4%
		164	100.0 %	56	100.0	220	100%

Tabel 1. Jumlah Video Open Reel 1" Tipe B dan C Berdasarkan Merek Dagang



Gambar 1. Jenis-Jenis Video Open Reel 1" yang Tersimpan di ANRI



Gambar 2. Contoh data rekaman dalam Video Open Reel 1"

Uraian	Jumlah (reel)		Jumlah (menit)		Total	
	Tipe B	Tipe C	Tipe B	Tipe C	Jumlah	Menit
Durasi < 60 menit	104	22	4435'27"	986'31"	126	5421'58"
Durasi > 60 menit	26	28	2036'10"	2160'30"	54	4196'40"
Tidak diketahui	34	6	-	-	40	-
Total	164	56	6471'37"	3147'1"	220	9618'38"
			Total			161 jam

Tabel 2. Jumlah waktu durasi replay open Video Open Reel 1" Tipe B dan C

BASF, SCOTCH, AGFA, AMPEX, dan SONY. Sementara itu open reel 1" tipe C berasal dari 3 (tiga) merek perusahaan yaitu BASF, SCOTCH, dan AMPEX (tidak ada dari AGFA dan SONY). Hasil Identifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Identifikasi Durasi (masa putar)

Identifikasi durasi dilakukan dengan melihat catatan yang terdapat dalam *container*-nya. Keseluruhan durasi yang akan didigitalisasi belum diketahui secara pasti karena data rekaman pada containernya tidak diketahui. Data rekaman pencatatan biasanya berisi No. Tape, Tanggal. Produksi, Judul, Durasi, Lokasi Shooting, P.D. Pelaksana, Keterangan/ Catatan Teknis, Batas Masa Simpan, Nama Operator atau Programme, Type, Recording Date, Duration, Play back, Full programme, B/W, Material, Color, dan Notice.

Hasil perhitungan untuk keseluruhan durasi open reel 1" tipe B yang ada catatannya adalah 6471'37" (6471 menit dan 37 detik) atau kira-kira 108 jam tayang. Sementara itu

hasil perhitungan untuk keseluruhan durasi open reel 1" tipe C yang ada catatannya adalah 3147'1" (3147 menit dan 1 detik) atau kira-kira 53 jam tayang. Total durasi yang diperoleh belum menggambarkan durasi sebenarnya dari keseluruhan video tape yang diidentifikasi karena tidak diketahuinya catatan durasi pada beberapa video tape. Hal tersebut bisa dimungkinkan karena memang kosong maupun catatannya tidak ada. Adapun rincian hasil identifikasi durasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Perawatan Video Tape

Identifikasi perawatan dilakukan melalui label yang melekat pada container bagian luar. Hasil identifikasi diketahui bahwa video tape open reel 1" tersebut sudah pernah dilakukan pembersihan/*cleaning*, dimana terbaca pada tahun 1983, 1984, 1986, 1987, 2011, 2012, dan 2013. Menurut petugas penyimpanan bahwa *cleaning* yang dimaksud hanya dilakukan dengan membersihkan video tape dari debu dan bagian tape pada

tinggi namun hasil reproduksi suara dan gambar memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah daripada tipe B. Meski demikian mesin pembaca Tipe C perawatannya lebih mudah karena hanya membutuhkan sedikit tempat dengan daya listrik yang lebih kecil. Video tape 1" tipe C yang telah diidentifikasi merupakan hasil produksi tahun 1979 – 1985.

Tahun Produksi dan Merk VideoTape

Berdasarkan identifikasi merk yang dilakukan, diketahui bahwa Open Reel 1" tipe B yang dapat diamati berasal dari 5 (lima) merek perusahaan yaitu



Gambar 4. Label perawatan videotape

permukaan yang nampak saja tidak sampai kedalam gulungan/roll seperti yang dilakukan pada film. Sementara itu pemutaran ulang/playback pada video tape open reel yang merupakan salah satu cara restorasi terhadap fisik media arsip belum pernah dilakukan karena tidak dimilikinya peralatan restorasi tersebut.

Menurut Richard Keatinge dalam “Causes and Measurement of Videotape Decay, 2009”, perkiraan rata-rata umur daya tahan format tape khusus 1” tipe C yang diproduksi tahun 1978 – 1991 adalah 25 tahun dengan risiko akibat hidrolisis yang tinggi. Jika berdasarkan data tahun produksi video tape yang ada di depo ANRI yaitu tahun 1979 – 1991, maka dapat dihitung semua video tape sudah berumur lebih dari 25 tahun pada tahun 2017, yang berarti kemungkinan akan terjadi risiko akibat hidrolisis. Dengan demikian maka perlu dilakukan alih media ke bentuk yang lebih aman dan tahan lama salah satunya melalui digitalisasi.

Dengan demikian maka supaya proses digitalisasi berjalan dengan baik, prioritas arsip yang akan didigitalisasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi kondisi fisik arsip, perawatan, merk dan durasi putar. Arsip video BCN yang mengalami deteriorasi dapat diprioritaskan proses digitalisasinya supaya bisa diketahui dampak dari kerusakan fisik terhadap informasi yang terkandung didalamnya. Namun apabila informasi pada arsip tersebut tidak dapat dibaca pada saat proses digitalisasi, maka arsip tersebut harus dilakukan restorasi terlebih dahulu. Demikian juga dengan hasil identifikasi perawatan dapat dijadikan dasar prioritas dalam melakukan proses digitalisasi apabila arsip yang mengalami deteriorasi sudah berhasil ditangani. Sementara itu hasil identifikasi merk video menjadi dasar dalam menentukan atau memilih video recorder yang akan digunakan pada saat proses digitalisasi sedangkan durasi putar berkaitan dengan

kebutuhan penyimpanan digital ketika proses digitalisasi berlangsung.

Daftar istilah

- Video tape merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk merekam suara/ audio dan gambar/video dalam satu kaset pita magnetik.
- Deteriorasi merupakan penurunan kualitas mutu produk akibat adanya kerusakan
- Container merupakan media/tempat untuk menyimpan per item arsip
- Hidrolisis adalah reaksi kimia yang memecah molekul air (H₂O) menjadi kation hidrogen (H⁺) dan anion hidroksida (OH⁻) melalui suatu proses kimia.

ROOSSENO: BAPAK BETON INDONESIA

Jika berbicara mengenai konstruksi beton bangunan di Indonesia tentunya akan menyinggung nama Prof. Dr. (H.C.) Ir. R. Roosseno Soerjohadikoesoemo. Roosseno merupakan salah satu insinyur terkemuka Indonesia produk prakemerdekaan. Ia dilahirkan di kota Madiun pada tanggal 2 Agustus 1908. Ia anak hasil perkawinan pasangan Raden Roostamhadji dan Raden Rara Endran. Pada usia delapan tahun ibunya meninggal dunia, kemudian ayahnya menikah lagi dengan Bendara Raden Ayu Martinah yang berasal dari Yogyakarta. Ibu tirinya ini yang kemudian membesarkan Roosseno.

Roosseno menempuh pendidikan mulai dari *Europeesche Lagere School* (ELS) lulus tahun 1922, *Meer Uitgebreid lager Onderwijs* (MULO) lulus tahun 1925, hingga *Algemene Middelbare School* (AMS) bagian B lulus tahun 1928 semuanya di Yogyakarta. Ketertarikannya di bidang teknik berawal dari seringnya ia melihat kereta api jurusan Batavia-Surabaya melintas di atas jembatan Bengawan Madiun.

Roosseno kecil merasa takjub dan penasaran melihat kekokohan konstruksi jembatan kereta api tersebut. Hal itulah yang menuntunnya untuk masuk ke *Technische Hoogeschool* (THS) Bandung. Roosseno diwisuda sebagai insinyur pada tanggal 1 Mei 1932. Ia sebagai satu-satunya pribumi dari sembilan insinyur yang diwisuda, tujuh orang keturunan Eropa dan seorang lagi keturunan Tionghoa.

Karir dan Pengabdian Roosseno

Setelah menamatkan pendidikannya di THS Bandung, Roosseno menjadi tenaga pengajar di almaternya (1932-1939). Ia menjadi asisten bagi Prof. Dr. Ir. Scheepers, seorang dosen ahli geodesi. Selain itu ia juga mendirikan Biro Teknik Roosseno-Soekarno (1932-



Sumber Arsip Foto: ANRI, Djapenpro Djabar 531010

Menteri Perhubungan Prof. Ir. Roosseno, sedang mengadakan pembicaraan pertama melalui sentral telepon otomatis dengan Walikota Bandung R. Enoch, 10 Oktober 1953.

1933). Soekarno merupakan rekan sealmamaternya yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia Pertama. Sayangnya biro teknik tersebut tidak bertahan lama karena tidak mendapat proyek yang disebabkan oleh malaise ekonomi yang melanda Hindia Belanda. Pertemanannya dengan Soekarno yang nasionalis membawanya terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai Ketua Fraksi Indonesia Raya (Parindra) di Geementeraad Bandung. Pada periode tahun 1935-1939 Roosseno bekerja di Departemen Pekerjaan Umum Bandung dan selanjutnya ditugaskan ke Kediri pada tahun 1939-1943. Pada masa pendudukan Jepang Roosseno diangkat sebagai guru besar (*kyooju*) untuk ilmu mekanika, beton, serta baja di almaternya yang telah berganti nama menjadi Bandoeng Koogyo Daigaku. Pada masa ini Roosseno juga ditunjuk menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mewakili kalangan akademisi. Ia menjadi anggota ke-24 dari 62 anggota PPKI. Pada tanggal 1 Juni

1945 saat Soekarno membacakan konsep dasar negara di depan sidang PPKI Roosseno juga berada di sana.

Pada era kemerdekaan Bandoeng Koogyo Daigaku diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung dan Roosseno dipercaya sebagai rektornya. Ketika Ibukota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Sekolah Tinggi Teknik Bandung pun pindah ke sana. Bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Ki Hajar Dewantara, Roosseno merintis Balai Perguruan Gadjah Mada yang kelak menjadi universitas. Selain itu Roosseno juga terlibat dalam pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN).

Selain aktif dalam bidang pendidikan, Roosseno juga dipercaya menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai menteri pekerjaan umum dan menteri perhubungan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Selama menjabat

sebagai menteri perhubungan Roosseno melakukan beberapa langkah penting seperti nasionalisasi 10 perusahaan kereta api milik Belanda, nasionalisasi perusahaan penerbangan Belanda KLM, mendirikan perusahaan pelayaran Jakarta Llyod dan Pelni, serta Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD). Roosseno juga pernah menjadi anggota delegasi RI pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Sebagai insinyur profesional, Roosseno juga menjadi direktur di beberapa perusahaan konsultan teknik seperti PT Exakta, Freyssinet Ltd, dan Biro Oktrooi Patent. Pada bidang profesi, Roosseno terlibat dalam pendirian organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bersama Ir. Djuanda dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).

Karya-karya Roosseno

Sebagai insinyur sipil yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, Roosseno sangat prihatin dengan minimnya buku teks di bidang teknik sipil. Ia kemudian menyusun tiga buah buku yang berjudul *Differential dan Integral* (1953), *Perhitungan Cross* (1953), dan *Beton Tulang* (1954). Sebelumnya, ia telah menulis teori mengenai panjang tekuk tiang dalam menyelesaikan masalah pada portal jembatan. Tulisan tersebut dimuat dalam majalah *De Ingenieur in Nederlands Indie* No. 11 bulan November 1937 dengan judul "Syarat Tekuk dari Roosseno." Ia juga menulis makalah dengan judul "*Tall Building Foundations in Jakarta*" pada tahun 1975. Makalah tersebut mengungkap dua hal penting pada bidang tiang pancang, yaitu sambungan tiang pancang dan tiang pancang dengan sayap.

Selain karya bersifat teoritis, Roosseno juga memiliki banyak karya konstruksi yang sangat monumental. Pada bidang jembatan karya Roosseno antara lain jembatan Rajamandala di Cianjur, jembatan Kertapati di Palembang, jembatan Semanggi, dan jembatan Rantauberangin di atas Sungai Batanghari, Kampar. Sedangkan untuk bangunan tinggi Roosseno menghasilkan konstruksi



(Sumber Arsip Foto: ANRI, Istiqlal No. 494)

Pembangunan Masjid Istiqlal. Dalam pembangunan Masjid Istiqlal, Roosseno bertanggung jawab pada konstruksi beton bagian kubah



(Sumber Arsip Foto: ANRI, Kempen Jakarta 1961)

Pembangunan Tugu Monas Tahun, 1961. Saat pembangunan Monas, Roosseno bertanggung jawab pada pondasi betonnya.

untuk menara TVRI, menara BPPT, dan Monumen Nasional (Monas). Pada bidang gedung bertingkat ia menghasilkan karya gedung Bank Indonesia, gedung Pola, pusat perbelanjaan Sarinah, hotel Ambarukmo, hotel Samudera Beach, hotel Bali Beach, dan sebagainya. Roosseno juga dipercaya untuk menjadi pengawas konstruksi pelabuhan di Bitung, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Mas, dan Banjarmasin. Ia juga terlibat dalam pembangunan kubah Masjid Istiqlal dan Masjid Agung Al Azhar di Jakarta. Roosseno juga terlibat dalam rekonstruksi Candi Borobudur bersama dengan arkeolog

terkemuka Indonesia R. Soekmono.

Dedikasi Roosseno yang total pada bidang yang ditekuninya mendatangkan apresiasi dari berbagai pihak. Pada tanggal 26 Maret 1977, ITB memberikan gelar Doctor Honoris Causa (H.C) pada Roosseno. Pemerintah juga memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Utama pada Roosseno. Selain itu, peran Roosseno dalam bidang konstruksi juga diabadikan dalam sehelai perangko terbitan tahun 2003. Setelah menghabiskan hidupnya di dunia konstruksi, akhirnya Bapak Beton Indonesia itu tutup usia di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1996.

(Oleh: Mudanto Pamungkas)



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MALANG

MENJAGA HAK KEPERDATAAN MASYARAKAT KABUPATEN MALANG DAN MENGENALKAN ARSIP PADA ANAK USIA DINI

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.544.315 jiwa (tahun 2015) yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan. Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan objek-objek wisatanya. Pada edisi kali ini, Majalah ARSIP mengangkat

potret penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Malang MADEP MANTEP MANETEP”. Adapun misi Kabupaten Malang yakni, pertama, menetapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya local, berwawasan gender supremasi hukum. Misi kedua, memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokrasi berbasis teknologi informasi. Kemudian misi ketiga, melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia. Keempat, mengembangkan ekonomi

masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kabupaten Malang juga memiliki misi untuk melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan produk unggulan. Keenam, mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang pengembangan produk unggulan. Terakhir, Kabupaten Malang berupaya memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam mendukung visi misi Kepala Daerah tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang telah menjalankan tugas pokok dan

fungsinya yang berkaitan dengan Misi ke 2 (dua) yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan demokrasi berbasis teknologi informasi”. Penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Malang dilaksanakan dengan melakukan penarikan arsip statis dilakukan melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang kepada semua OPD untuk menyetorkan arsip statis dengan masa JRA sekurang-kurangnya 10 tahun kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang. Dispursip Kabupaten Malang telah melakukan sosialisasi pengelolaan arsip statis kepada semua OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Dispursip Kabupaten Malang juga telah melakukan kunjungan dan pendampingan guna memperoleh estimasi arsip statis dengan masa JRA sekurang-kurangnya 10 tahun yang akan dikirim ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kabupaten Malang. Dispursip Kabupaten Malang telah melakukan fumigasi untuk mensterilkan arsip statis yang baru diterima dan pengelolaan arsip yang telah diterima untuk ditempatkan pada sarana penyimpanan di Depo Arsip Kabupaten Malang. Selain itu, Dispursip Kabupaten Malang melakukan preservasi dan fumigasi arsip secara berkala guna menjaga keawetan arsip statis serta menyusun daftar arsip untuk memudahkan dalam pelayanan dan pencarian fisik arsip yang dibutuhkan.

Dispursip Kabupaten Malang memiliki beberapa program strategis yakni, pertama Program Pengembangan dan Pengawasan

Kearsipan terdiri dari sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta, penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip, dan pengawasan kearsipan. Dispursip Kabupaten Malang juga memiliki program penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip, pemeliharaan dan pengamanan arsip statis, penyelamatan/akuisisi arsip statis dari badan pemerintah, swasta dan perorangan serta pelayanan dan informasi arsip statis.

Dispursip Kabupaten Malang terus berupaya melakukan Inovasi-inovasi kearsipan, sehingga keberadaan arsip di Kabupaten Malang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pengemban tugas Dispursip Kabupaten Malang. Beberapa inovasi kearsipan yang dilakukan oleh Dispursip Kabupaten Malang diantaranya program alih media

tentang pengamanan arsip vital (Letter C), program Pengenalan Arsip Pada Anak (PAPA), dan Program Sistem Informasi Arsip Masyarakat (SIAM).

“Kita garap alih media arsip letter C, Kita juga mengamankan arsip masyarakat, dokumen sejak dia lahir sampai mati, dalam perjalanannya kan ada ijazah, sampai surat kematian itu kita alih media, kita scan”, tutur Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, Sukowiyono. Lebih lanjut Sukowiyono menambahkan bahwa alih media tersebut dilakukan agar ketika terjadi bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan, arsip digitalnya masih tersimpan. “Kita juga mengenalkan arsip pada usia anak-anak, mulai PAUD, TK, SD, SMP secara berkala” terang Sukowiyono.

Dalam konteks pembinaan kearsipan, Dispursip Kabupaten Malang mengadakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada



Laporan Monitoring dan Evaluasi Kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, Sukowiyono

pelaksana kearsipan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil monitoring pelaksanaan sistem kearsipan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dipublikasikan pada laman website <http://perpus-arsip.malangkab.go.id>. Publikasi dilakukan agar tiap-tiap OPD kompetitif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam penyelenggaraan kearsipan. Pembinaan arsip yang telah dilakukan oleh Dispursip Kabupaten Malang juga menjangkau pembinaan arsip desa yakni dengan memberi bimbingan teknis kearsipan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta melakukan Monitoring dan Evaluasi Kearsipan kepada 378 Desa di wilayah Kabupaten Malang.

Arsip statis yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang berjumlah 47.000 berkas arsip statis. Upaya yang

dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang dalam mengenalkan sejarah Kabupaten Malang kepada masyarakat melalui arsip diantaranya dengan memasang arsip foto Bupati Malang dari yang pertama hingga saat ini. Kemudian, Dispursip Kabupaten Malang melakukan kegiatan pameran Hari Jadi Kabupaten Malang dengan menampilkan arsip foto bersejarah tentang Kabupaten Malang yang dilaksanakan setiap tahun. Di samping itu, Dispursip Kabupaten Malang telah membuat buku sejarah Kabupaten Malang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Dewan Kesenian Kabupaten Malang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bukan berarti tidak menemui hambatan atau kendala. Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dispursip Kabupaten Malang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan terkait keterbatasan anggaran. Selain itu, pada Dispursip Kabupaten Malang belum memiliki tenaga arsiparis baik di LKD maupun di OPD serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip bagi *stakeholder* kearsipan di Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang berharap terhadap penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Malang yakni perlu adanya peningkatan anggaran penyelenggaraan kearsipan. Di samping itu, diharapkan perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia di Lembaga Kearsipan Kabupaten Malang serta tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai dengan luas wilayah di Kabupaten Malang.

Adapun capaian ataupun penghargaan yang telah diperoleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang diantaranya Juara 1 Lomba LKD tingkat Provinsi Jawa Timur, Juara 3 Terbaik Lomba LKD tingkat nasional, dan Pengawasan Terbaik Nasional. (Is)

Desi Pratiwi

NAMA BAYI OLIVIA DAN JACK PALING POPULER DI SCOTLANDIA MENURUT ANGKA YANG DITERBITKAN OLEH NATIONAL RECORDS OF SCOTLAND (NRS)

National Records of Scotland (NRS) mempublikasikan jumlah angka paling tinggi untuk nama yang diberikan pada bayi Skotlandia pada tahun 2017, yaitu Jack dan Olivia. Nama-nama tersebut menduduki tempat teratas dalam pilihan nama-nama untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan warga Skotlandia sejak tahun 2016. Sementara, nama keluarga Smith, Brown, dan Wilson telah menjadi nama keluarga paling umum tercatat dalam register selama lebih dari 40 tahun, berdasarkan analisis lima tahunan sejak tahun 1975.

NRS dibentuk pada tanggal 1 April 2011 atas dasar penggabungan dua lembaga nasional, yaitu General Register Office for Scotland (GROS) dan National Archives of Scotland (NAS). Kepala Eksekutif NRS berperan sebagai Registrar General for Scotland (Panitera Umum untuk Skotlandia) dan Keeper of the Records of Scotland (Kepala Arsip Nasional Skotlandia). Fungsi dan tugas NRS adalah melakukan registrasi dan fungsi statistik kependudukan serta

melestarikan arsip nasional Skotlandia. NRS dipimpin oleh seorang Chief Executive, Keeper of the Records/Registrar General.

Khazanah Arsip Paling Beragam di Kepulauan Inggris

NRS memiliki salah satu khazanah arsip paling beragam di Kepulauan Inggris. Ini adalah arsip utama untuk sumber sejarah Skotlandia sebagai kerajaan yang terpisah, perannya di Kepulauan Inggris serta hubungan antara Skotlandia dan banyak negara lain selama berabad-abad. Arsip yang disimpan di NRS mencakup abad ke-12 sampai abad ke-21, yang menyentuh hampir semua kehidupan Skotlandia.

Sejarah awal arsip Skotlandia mencerminkan sejarah bermasalah Skotlandia itu sendiri. Banyak arsip hilang sebagai akibat dibawa keluar dari negara pertama kali pada abad ke-13 oleh Edward I selama Perang Kemerdekaan dan kemudian oleh Oliver Cromwell pada abad ke-17. Akibatnya, arsip publik Skotlandia paling awal yang masih ada adalah

Quitclaim of Canterbury tahun 1189; arsip pribadi tertua adalah piagam dari David I kepada gereja St Cuthbert di Edinburgh, tahun 1127. Arsip paling awal yang selamat hanya hingga tahun 1326; arsip Great Seal hanya bertahan dari tahun 1315; dan, meskipun ada beberapa arsip awal yang dimulai pada 1292, arsip lengkap Parlemen tidak dimulai sampai tahun 1466. Referensi pertama kepada pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga arsip dari tahun 1286. William of Dumfries adalah pegawai dari arsip 'kapel' kerajaan atau kanselir. Kantor ini kemudian berkembang menjadi kantor Lord Clerk Register.

Ketika perang pecah antara Skotlandia dan Inggris pada tahun 1296 dan Edward I menyerbu, ia memiliki semua simbol kebangsaan Skotlandia – regalia, arsip nasional, dan Batu Takdir – yang dipindahkan ke London. The Treaty of Edinburgh-Northampton mengakhiri Perang Kemerdekaan pertama pada tahun 1329 dan kembalinya arsip ke Skotlandia. Namun, arsip itu tetap di London, banyak yang hilang, dan



Berlokasi di pusat Edinburgh dengan ruang pencarian di General Register House yang bersejarah (<https://www.nrscotland.gov.uk/research/visit-us/scotlandspeople-centre>)

ketika sisa-sisa arsip dikirim kembali ke Skotlandia pada tahun 1948, hanya sekitar 200 dokumen yang tersisa. Selama masa pemerintahan Robert I, 'the Bruce' (1306-1329) dan dengan sifat negara yang lebih menetap setelah pertempuran Bannockburn pada 1314, arsip nasional tumbuh secara kuantitas. Arsip terkumpul selama berabad-abad dan pada pertengahan abad ke-16 menjadikan kebutuhan untuk membangun 'register house' khusus di Kastil Edinburgh untuk menampung mereka.

Arsip tetap aman di Istana sampai diambil oleh tentara Cromwell pada bulan Desember 1650. Orang-orang Skotlandia diizinkan untuk memindahkan arsip dan menyimpan di Stirling Castle. Ketika Skotlandia jatuh ke Inggris pada bulan Agustus 1651, beberapa arsip dibawa oleh garnisun, beberapa diselamatkan oleh para juru tulis, tetapi sebagian besar dikirim ke London. Pemandangan arsip terbukti sangat tidak nyaman, sehingga pada tahun 1657, register hukum dikembalikan ke Skotlandia. Pemandangan tidak dilakukan sampai restorasi Charles II pada tahun 1660 ketika arsip lain dikirim kembali. Salah satu dari dua kapal yang membawa arsip, 'Elizabeth', tenggelam dalam badai di lepas pantai Northumbria dengan hilangnya semua dokumen dan perkamen di atas kapal.

Arsip yang selamat dari pelayaran



Bagian Kelahiran, Kematian, dan Perkawinan di New Register House.

Gambar: Jon Savage

(<https://www.edinburghnews.scotsman.com/news/review-recommends-closure-of-general-register-house-1-3683218>)

utara itu disimpan lagi di Kastil Edinburgh. Tetapi pada 1662, register hukum dipindahkan ke Laigh Parliament House di Royal Mile di Edinburgh, di mana arsip parlementer dan lainnya dari Castle bergabung pada tahun 1689. Langkah itu sebagian dirancang untuk mempromosikan akses ke arsip, tetapi akomodasi itu jauh dari memuaskan serta arsip rusak karena basah dan hama. Arsip ditumpuk di lantai dan bagian belakang lemari yang basah karena lembap. Kebakaran besar tahun 1700, yang mengancam Gedung Parlemen, memaksa pemindahan sementara arsip itu ke gereja St Giles demi keamanan.

Meskipun Perjanjian Union tahun 1707 menetapkan bahwa arsip publik tetap berada di Skotlandia sepanjang masa, tidak ada dana masyarakat yang tersedia untuk menyediakan akomodasi dan pengawasan yang memadai bagi arsip.

Gedung Arsip Nasional Tertua di Dunia

Pada pertengahan abad kedelapan belas, kebutuhan untuk menyediakan akomodasi untuk arsip nasional telah dikenal secara luas di Skotlandia. Pembangunan gedung arsip nasional Skotlandia dimulai ketika arsitek terkemuka Robert Adam dan saudara laki-lakinya James dipilih untuk proyek



Di lokasi ini, Anda memiliki akses ke register kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya menurut undang-undang; hasil sensus; arsip gereja; valuation rolls; dan arsip hukum dari pengadilan hukum di Skotlandia. (<http://scotlandspeople.gov.uk/about-us>)

tersebut, dan batu fondasi diletakkan pada tahun 1774. Sebuah lokasi dipilih di depan ujung Jembatan Utara yang sedang dibangun. Saat melakukan kontrol ketat dari London melalui juru tulis kerjanya dan penyediaan gambar yang terperinci, Adam menggunakan batu dari tambang tetangga, pedagang Edinburgh untuk perbekalan, serta tukang batu lokal dan pengrajin.

Dana pembangunan gedung arsip nasional sebesar £ 12,000 diperoleh pada tahun 1765 dari perkebunan Jacobites, yang hangus setelah pemberontakan tahun 1745. Pada tahun 1779, uang itu habis dan bangunan itu tetap menjadi cangkang kosong sampai tahun 1785. Lokasi yang kumuh, yang digambarkan sebagai 'rumah merpati paling megah di Eropa', adalah tempat para pencuri dan kantong-kantong pencuri. Bangunan itu akhirnya dibuka untuk umum pada tahun 1788. Robert Reid, yang juga arsitek Gereja St George (sekarang West Register House), menyelesaikan bangunan itu sesuai dengan rencana Adam tahun 1820-an, tetapi dengan fasad (muka bangunan) utara yang jauh lebih sederhana. Reid juga merancang Ruang Antiquarian (sekarang Ruang Pencarian Historis), yang dibuka untuk umum pada tahun 1847. General Register House adalah salah satu bangunan arsip yang paling

tua yang masih terus digunakan di dunia.

New Register House, bangunan utama dari General Register Office untuk Skotlandia, dekat dengan ujung timur Princes Street yang terkenal di Edinburgh, dirancang oleh Robert Matheson, Panitera Pekerjaan di Kantor Pekerjaan Her Majesty di Skotlandia, yang bertanggung jawab atas bangunan pemerintah pada saat itu. Dia juga mendesain gedung Kantor Pos Umum Edinburgh di dekatnya.

Lokasi New Register House, di Jalan Gabriel, diperoleh pada tahun 1859. Arsitek bertujuan agar gedung baru mengharmoniskan dengan Register House yang telah ada yang dirancang oleh Robert Adam pada abad ke-18. Sebuah serambi ditambahkan ke elevasi selatan untuk memberinya karakter bangunan publik; dan gaya penyelesaian internal dibuat sederhana. Bangunan ini pertama kali ditempati pada tahun 1861 dan selesai pada tahun 1863 menyusul penambahan 5 kantor ke setiap lantai di sisi utara. Akuntan di departemen Bankruptcy and Lord Lyon juga dialokasikan kamar. Biayanya, lengkap dengan peralatan, hampir 35.000 pound untuk membangun.

Fitur utama dari bangunan elegan ini adalah repositori sentral yang tahan

api, Dome, yang terdiri dari lima lapis rak dan galeri besi yang mirip dengan yang ada di British Museum di London dan dikelilingi di bagian luar oleh staf dan ruang pencarian di tiga lantai. The Dome adalah ruang melingkar yang besar dan mencolok, lebih dari 27 m (90 kaki) tinggi dan sangat menarik sebagai bagian dari arsitektur fungsional abad ke-19 dan rekayasa struktural.

Rak arsip sepanjang 6,5 km (4 mil) di Dome berisi kurang lebih setengah juta volume arsip. Ini termasuk sekitar 400.000 register wajib dari semua kelahiran, kematian, dan perkawinan di Skotlandia sejak tahun 1855, masih bertambah setiap tahun. Volume kelahiran dalam warna merah berada di tingkat pertama, volume kematian dalam warna hitam di tingkat yang kedua, dan volume pernikahan berwarna hijau di tingkat ketiga. Jadwal pernikahan asli, yang ditandatangani oleh pihak-pihak segera setelah upacara perkawinan di Skotlandia, disimpan di tingkat atas Dome seperti halnya arsip sensus terbuka dari tahun 1841 hingga tahun 1891.

Daftar paroki tua mungkin adalah harta terbesar di New Register House. Volume tertua berasal dari tahun 1553 dan untuk paroki Errol, dekat Perth.

Pada tahun 1980-an, kedua lokasi di pusat kota sudah penuh dan sudah jelas bangunan lain dibutuhkan. Ini memberikan kesempatan unik untuk merancang gedung arsip modern. Pada tahun 1994, Thomas Thomson House dibangun di sebelah barat Edinburgh dan dibuka tahun berikutnya oleh Putri Kerajaan. Gedung baru ini dirancang untuk arsip nasional Skotlandia hingga pertengahan abad 21, bangunan ini pada dasarnya adalah dua bangunan terpisah yang disatukan. Satu blok berteknologi tinggi menyediakan lebih dari 37 kilometer penyimpanan arsip yang dikontrol lingkungan, sementara gedung-gedung lain tempat menerima dan menyortir arsip, kantor staf, dan unit konservasi yang dibangun khusus.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG
KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara;

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip keabsahan dan standar kearsipan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang penyelenggaraan kearsipan nasional.

RIO ADMIRAL PARIKESIT

KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM KEARSIPAN NASIONAL

Pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) perlu disokong dengan berbagai sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung dalam hal ini adalah dukungan terhadap sistem kearsipan nasional yang antara lain memuat kebijakan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan. Kebijakan sebagai salah satu sumber daya pendukung merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah selaku pejabat yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam

penyusunannya melalui berbagai tahapan. Dalam UU Kearsipan, tanggung jawab menetapkan kebijakan kearsipan nasional diemban oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kebijakan kearsipan nasional dapat berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam penyelenggaraan kearsipan.

Penetapan kebijakan kearsipan nasional yang dilaksanakan oleh ANRI meliputi bidang pembinaan,

pengelolaan arsip, pembangunan SKN, pembangunan SIKN, dan pembentukan JIKN, organisasi, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerja sama dan pendanaan. Dalam rangka penetapan kebijakan kearsipan nasional di sepuluh bidang tersebut, dilakukan pengaturan mengenai arah, tujuan, dan sasaran, kewenangan, aspek dan jenis, metode dan tata cara pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis, ketentuan fungsional, persyaratan pembentukan SIKN dan JIKN, pengaturan, penyediaan, dan penggunaan informasi kearsipan

dalam satu kesatuan sistem nasional, standar fungsi, penjaminan mutu, peningkatan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, serta penjaminan mutu sumber daya manusia kearsipan, standar kualitas dan spesifikasi prasarana dan sarana kearsipan, kriteria, tanggung jawab, dan strategi perlindungan dan penyelamatan arsip, strategi dan diseminasi pencapaian visi dan misi penyelenggaraan kearsipan, prinsip dan ruang lingkup kerja sama kearsipan dan program dan pendanaan penyelenggaraan kearsipan.

Kerangka Pembangunan Hukum Kearsipan Nasional

Kerangka pembangunan hukum kearsipan nasional telah disusun dalam UU Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP Kearsipan). Dalam kedua peraturan tersebut, telah mendelegasikan kewenangan penetapan sepuluh bidang kebijakan dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Kepala ANRI. Secara teknis, UU Kearsipan mendelegasikan penyusunan (empat) Peraturan Kepala ANRI antara lain dalam Pasal 42 ayat (2) mengenai tata cara pembuatan daftar arsip dinamis, dan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis, Pasal 43 ayat (5) mengenai tata cara pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga, Pasal 56 ayat (3) mengenai pembuatan pedoman penyusunan program arsip vital dan Pasal 66 ayat (4) mengenai kewenangan kepala lembaga kearsipan dalam penerbitan izin akses akses tertutup untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam PP Kearsipan didelegasikan sebanyak 19 (sembilan belas) Peraturan Kepala ANRI yang antara lain diatur dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 15, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 32 ayat (3), Pasal 46, Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (3),

Pasal 55, Pasal 89, Pasal 95 ayat (5), Pasal 105, Pasal 108 ayat (2), Pasal 113, Pasal 124, Pasal 137, Pasal 146, Pasal 157 ayat (3), dan Pasal 159 ayat (1).

Hingga saat ini dari 23 (dua puluh tiga) amanat Peraturan Kepala ANRI yang harus disusun, ANRI telah

NO	SUBBIDANG	KETERANGAN
1.	Pengawasan	Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
3.	Akreditasi	Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Perka ANRI No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perka ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan.
4.	Sertifikasi	Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Serifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
5.	Penghargaan	1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2015 Pedoman Penghargaan Kearsipan; 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional.
6.	Pengelolaan Arsip Dinamis	1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip 3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara; 5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga; 6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI No 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip; 7. Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan JRA 8. Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Arsip.
7.	Pengelolaan Arsip Statis	1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penelusuran Arsip Statis Di Lingkungan Pencipta Arsip. 3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip. 4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder. 5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis. 6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Akses dan Layanan Arsip Statis. 7. Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Keterbukaan Arsip Statis Untuk Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Serta Penyelidikan dan Penyidikan.
8.	Pembangunan SIKN dan pembentukan JIKN	1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi SIKD dan Aplikasi SIKS; 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis Untuk Penyelenggaraan SIKN; 3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

NO	SUBBIDANG	KETERANGAN
9.	Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2012 Pedoman Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah; 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2012 Pedoman Penyelenggaraan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara 3. Peraturan Kepala ANRI No. 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
10.	Gedung dan Ruang Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif, 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip.
11.	Peralatan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide Arsip, 2. Keputusan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Box Arsip, 3. Keputusan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip; 4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip/Dokumen Permanen.
12.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana; 2. Perka ANRI No. 36 Tahun 2015 tentang Imbalan Penyerahan Arsip Statis; 3. Perka ANRI No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah;
13.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis; 2. Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis; 3. Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Serifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis; 4. Perka ANRI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis; 5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis; 6. Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Jabatan fungsional Arsiparis; 7. Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing.

13 (tiga belas) subbidang penyelenggaraan kearsipan
 Sumber: Bagian Hukum dan Perundang-undangan Maret 2018

menunaikan sebagian tugasnya dengan menetapkan 20 (dua puluh) Peraturan Kepala ANRI. Tiga Peraturan Kepala ANRI yang saat ini dalam proses penyusunan dan harmonisasi terdiri dari Peraturan Kepala ANRI tentang Pedoman Pengolahan Arsip sebagaimana diamanatkan Pasal 105, Peraturan Kepala ANRI tentang Tata Cara Pengujian Dalam Rangka Autentikasi Arsip Statis amanat Pasal 108 ayat (2), dan Peraturan Kepala ANRI tentang Pedoman Retensi Arsip urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pangan, pertanian,

pemberdayaan masyarakat dan desa, energi dan sumber daya mineral serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Berikut ini adalah daftar Peraturan Kepala ANRI yang telah disusun berdasarkan atribusi dan delegasi dari UU Kearsipan dan PP Kearsipan yang telah dijabarkan dalam 13 (tiga belas) subbidang penyelenggaraan kearsipan.

Kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kerangka pembangunan hukum kearsipan nasional. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum dimana setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mendekatkan negara pada tercapainya tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dicita-citakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Kearsipan.



Diah Minarti Rahayu

PENGENALAN PROFESI ARSIPARIS MELALUI KELAS INSPIRASI YOGYAKARTA #6

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian ditegaskan lebih lanjut pada pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Artinya pendidikan merupakan salah satu hak dasar dalam kehidupan bernegara dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada setiap warga negara Indonesia. Atas dasar itulah, pada 2009, Anies Baswedan, salah satu tokoh pendidikan Indonesia menggagas suatu gerakan bernama "Indonesia Mengajar" sebagai salah satu bentuk upaya memberikan hak pendidikan kepada warganegara sekaligus bentuk kepedulian terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

Tentang Kelas Inspirasi

Sejalan dengan visi Gerakan Indonesia Mengajar, pada 2012 sekumpulan kaum profesional muda Yogyakarta pun terinspirasi melakukan hal serupa dengan membentuk Kelas Inspirasi Yogyakarta. Kelas Inspirasi Yogyakarta adalah kegiatan yang

mewadahi para kaum profesional dari berbagai latar belakang profesi untuk ikut serta berkontribusi pada misi perbaikan pendidikan di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk menginspirasi murid Sekolah Dasar (SD) dengan cara mengundang para profesional untuk menjadi inspirator dan berbagi cerita tentang profesi mereka. Disatu sisi gerakan ini juga bertujuan menjadi media pembelajaran bagi para profesional mengenai kenyataan dan fakta kondisi pendidikan disekitar mereka. Kehadiran gerakan ini diharapkan dapat menginspirasi siswa SD agar termotivasi untuk bercita-cita lebih tinggi dan memberikan mereka satu alasan lagi untuk tetap terus bersekolah.

Menjadi Arsiparis Yang Menginspirasi

Kegiatan inti dari gerakan ini ialah melakukan kunjungan ke sebuah Sekolah Dasar yang telah ditentukan. Para profesional (biasa disebut penginspirasi) melakukan presentasi dan bercerita didepan kelas tentang profesi keseharian mereka

untuk memotivasi para siswa. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya, dan tahun 2018 ini telah memasuki tahun ke-6 pelaksanaannya. Tema Kelas Inspirasi Yogyakarta #6 pada tahun ini adalah "KIY Dalam Potret Sejuta Pesona", yang dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Maret 2017. Sesuai tema tahun ini, sekolah yang menjadi sasaran adalah sekolah yang berada dekat dengan kawasan wisata di Yogyakarta tepatnya di SDN Clapar Hargowilis Kulon Progo (40 km dari pusat kota Yogyakarta), tidak jauh dari kawasan wisata Kalibiru. Jumlah siswa di sekolah tersebut tidak terlalu banyak, hanya berjumlah 25 siswa, namun hal itu tidak mengurangi



Pengenalan arsip peta pada siswa kelas inspirasi

semangat mereka dalam menerima kunjungan para relawan pengajar.

Pada hari H, saya bersama 14 relawan pengajar dan relawan dokumentasi lainnya menuju lokasi SDN Clapar Hargowilis Kulon Progo untuk melakukan edukasi dan presentasi profesi kerja. Diantara relawan pengajar terdapat berbagai macam profesi antara lain arsitek, designer, pembaca berita, motivator, analis gas dan bumi, dan saya sebagai seorang arsiparis tentunya. Bekerja sama dengan relawan dari berbagai macam latar belakang profesi merupakan nilai tambah yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, karena saya bisa bertukar informasi tentang dunia kerja mereka sehari-hari.

Tantangan terbesar dalam event kali ini bagi saya ialah ketika saya harus mempresentasikan profesi arsiparis kepada para siswa SD. Bukan sesuatu yang tergolong mudah, mengingat profesi arsiparis masih sangat asing terdengar ditelinga mereka dibandingkan profesi populer lainnya seperti dokter, pilot, guru, polisi, dan sebagainya. Namun hal ini tidak membuat saya putus asa, akan tetapi justru menjadikan ini sebagai kesempatan berharga dan motivasi tersendiri untuk menjelaskan sedini mungkin kepada mereka tentang apa itu arsip dan arsiparis.

Satu demi satu para relawan pengajar secara bergantian melakukan presentasi dan bercerita tentang keseharian dunia kerja mereka. Para siswa pun terlihat antusias mendengarkan setiap cerita dari para relawan sambil sesekali menyela untuk bertanya tentang sesuatu istilah yang mereka tidak mengerti. Hingga tibalah giliran saya untuk menjelaskan profesi kerja yang saya lakukan sehari-hari, ya arsiparis!.



Para siswa kelas inspirasi dan relawan pengajar serta jajaran guru berfoto bersama usai kelas inspirasi selesai

Sempat ragu pada awalnya, apakah para siswa Sekolah Dasar tersebut mampu menerima penjelasan dan cerita saya tentang dunia kerja arsiparis. Namun, dengan kesabaran dan sedikit kreatifitas, pada akhirnya penjelasan saya tentang profesi arsiparis mampu dengan mudah dipahami para anak-anak tersebut. Dalam proses mengajar, saya mengenalkan profesi arsiparis itu seperti apa, dimana tempat saya bekerja, dan apa saja rutinitas yang dilakukan selama bekerja. Untuk menambah visualisasi mereka terhadap arsip, saya pun memperlihatkan beberapa contoh arsip statis berbahasa Belanda, arsip peta dan arsip kearsitekturan serta bagaimana cara mengolah dan menggunakan arsip tersebut. Diluar dugaan, mereka pun menyimak dan menyambut penjelasan saya tentang profesi arsiparis secara antusias ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang terlontar selama sesi pengajaran. Saya pun merasa senang

dan bahagia melihat antusiasme mereka dalam menerima pelajaran.

Akhirnya acara Kelas Inspirasi ini pun diakhiri dengan sesi foto bersama antara para siswa dan relawan. Saya turut merasa senang dan bangga bisa mengambil peran dalam kegiatan ini, terlebih lagi bisa mengenalkan dan memberikan inspirasi kepada para siswa Sekolah Dasar tentang profesi arsiparis sesuai kompetensi yang saya tekuni. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membuka cakrawala cita-cita mereka sehingga bisa tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Bahkan bukan suatu hal yang tidak mungkin kelak suatu hari diantara para siswa tersebut ada yang akan menjadi seorang arsiparis profesional, semoga! –dmr-

Farhah Faridah

AKU DAN SENARAI MEMORI

Cuaca Kota Bogor siang itu hujan deras. Kututup rapat-rapat pintu setelah kuangkat jemuran dan menyimpannya dalam ruang setrikaan. Kulangkahkan kaki menuju kamar anak-anak. Sulung asyik dengan novel yang baru dibelinya semalam dan bungsu sedang menyelesaikan gambarnya.

“Bunda takut petir, ya?” tanya bungsu melihatku sepiintas dan meneruskan gambarnya.

“Masa, sih bunda takut?” sulung menimpali dan melanjutkan membaca. “Paling ayah sebentar lagi juga pulang. Ayah bilang cuma membuka acara kemahasiswaan di kampus sampai jam makan siang.” lanjut sulung

“Ok. Bunda nggak takut, kok. Cuma mau cek aja ke sini. Siapa tahu lagi pada tidur setelah baru saja makan siang. Apalagi hujan deras dan dingin di hari libur begini. Satu hal lagi, bunda khawatir ada yang main *handphone* saat hujan dan petir begini. Bahaya!” Kataku tersenyum.

“Oooh.” Mereka mengucapkannya berbarengan dan kembali asyik dengan kegiatannya.

Aku menuju ruang depan dan memandang hujan lewat kaca jendela yang dibatasi *gordyn* tipis. Hujan masih

deras dan sesekali bunyi petir terdengar menggelegar. Kuurungkan tanganku yang hendak mengambil *handphone*. Aku yang membuat peraturan larangan penggunaan *handphone* saat hujan dan petir. Aku harus mematuhi. Kulangkahkan kakiku menuju pintu depan, membukanya dan meneruskan langkah menuju pintu garasi. Kubuka garasi dengan sedikit tubuh diterpa air hujan. Pintu garasi harus kubuka agar suamiku dapat langsung memasukkan kendaraan. Kututup kembali pintu depan dan kurebahkan tubuhku di sofa menantikan kedatangan suami. Perlahan kututup mataku.

“Bunda, bangun!” perlahan terasa ada yang mengusap rambutku. Dengan enggan kubuka mataku. Nampak suamiku berdiri di depanku. “Nyenyak sekali tidurnya.” Suamiku duduk di sofa.

“Kapan ayah datang?” tanyaku.

“Sekitar jam satu. Anak-anak yang membuka pintu. Hujan deras membuatmu tertidur nyenyak.” Katanya. “Oh, iya, ada WA dari Uwa Ucup, katanya di Cirebon banjir. Banjir hampir di sebagian wilayah Cirebon.” lanjutnya.

“Banjir?” tanyaku tidak percaya. “Seumur-umur di Cirebon sejak bayi

sampai aku lulus SMA tidak pernah banjir. Kenapa ya penyebabnya? Bagaimana juga rumah Uwa Ucup?” tanyaku. Sekilas kulihat dari jendela hujan sudah reda. Tinggal gerimis kecil.

“Rumah Uwa Ucup aman. Tadi dia terjebak macet di jalan karena banjir. Sekolah SMA kita juga banjir.” kata suamiku.

“Apa?” tanyaku terkejut. “Bagaimana arsip-arsip data sekolah?” tanyaku panik dan tiba-tiba saja terpikir tentang arsip sekolah. Barangkali ini adalah efek dari baru selesainya aku diklat kearsipan dua hari yang lalu. “Terlalu banyak kenangan di sekolah kita itu dan terekam dalam arsip.” kataku memikirkan arsip sekolah yang menurut analisisku adalah sebagiannya termasuk arsip penting atau vital. Seingatku ruang tata usaha terletak di lantai dasar. “Aku berharap dan berdoa, mudah-mudahan pengelolaan arsipnya sudah sesuai dengan standar kearsipan. Dengan demikian arsip-arsip vital sudah disiapkan penyimpanannya dengan memperhitungkan pra bencana dan pasca bencana.” Kataku seolah-oleh pada diriku sendiri. Suamiku menyeruput kopi yang dibuatnya sendiri. Sepertinya menyimak

CERITA KITA

kalimatku. Kuperhatikan suamiku yang sedang memegang cangkir. Mungkin juga dia sedang memikirkan kenangan masa SMA bersamaku. Aku menikah dengan kakak kelasku di SMA. Sama-sama lahir dan besar di Cirebon.

“Biasanya yang vital itu salah satunya terkait aset ya, Bun?” tanyanya mengejutkan dan menghentikan terawangkanku. Ternyata dia tidak sedang memikirkan kenangan SMA, tetapi sedang menyimak pembicaraan tentang arsip. Dia bertanya padaku tentang arsip karena dia tahu aku beberapa kali ikut diklat di Pusdiklat Kearsipan ANRI dan salah satunya adalah Diklat Program Arsip Vital.

“Ya. Sebagai bukti kepemilikan aset instansi. Selain itu dikatakan vital karena merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi, karena tidak dapat digantikan dari aspek administrasi maupun legalitasnya.” kataku dengan nada sedih. Cirebon adalah kota kenangan dan kenangan itu banyak tersimpan di gedung sekolah sejak *playgroup* sampai SMA. Aku pernah menjadi bagian di dalamnya.

“Termasuk akte pendirian, master kurikulum, arsip ijazah jika ada dan buku induk siswa juga ya, Bun?” tanya suamiku lagi.

“Ya. Karena itulah hal yang penting bagi setiap instansi membuat program arsip vital, diawali dengan identifikasi, pengkategorian arsip dan menganalisis arsip dari sisi hukum dan resikonya. Kemudian harus diprogramkan juga bagaimana cara perlindungan dan pengamanan arsip vital dengan penduplikasian dan dispersal. Itu penting jika terjadi bencana kayak banjir di Cirebon sekarang ini.” kataku.

“Berarti harus direncanakan tempat khusus untuk menyimpan arsip yang vital itu, ya?” tanyanya lagi.

“Pastinya. Bisa gunakan lemari tahan api atau tempat khusus di lantai dua untuk menghindari banjir. Pokoknya dijauhi dari segala resiko

bencana dan pencurian. *By the way*, kenapa ya Cirebon sekarang banjir?” tanyaku balik bertanya.

“Itu karena plus minus dampak dari pembangunan. Pembangunan infrastruktur sangat terasa di Cirebon. Coba saja perhatikan dan ingat-ingat! Dalam tiga tahun terakhir banyak hotel-hotel baru, plaza atau *mall* baru, cabang-cabang dari *brand* makanan ternama, ruko dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum seperti jalan raya.” Suamiku menghabiskan kopinya.

“Maksudnya, lahan-lahan hijau sebagai penyerapan air sekarang sudah berganti menjadi bangunan-bangunan, gitu?” tanyaku.

“Ya, salah satunya. Faktor lainnya adalah harus dipikirkan dalam pembangunan infrastruktur adalah pembuatan drainase yang baik untuk pencegahan bencana banjir. Bukan hanya arsip-arsip instansi saja yang mengalami resiko rusak atau hilang karena banjir tetapi juga aset-aset yang berada dalam bangunan baru tersebut mengalami kerugian karena banjir.” Panjang lebar suamiku menerangkan.

“Memungkinkan juga pada bangunan-bangunan baru terdapat akta pendirian, *blue print* dan izin operasional yang masih tersimpan sementara?” kataku seolah-olah bertanya.

“Ya, seperti yang bunda bilang. Perlunya program arsip vital bagi setiap organisasi atau instansi untuk melindungi arsip-arsip penting atau vitalnya agar kelangsungan organisasi tetap berjalan sebelum dan sesudah terjadi bencana.” Suamiku tersenyum padaku. Walaupun dia belum pernah diklat kearsipan, nampaknya dia cukup paham tentang arsip karena aku sering bercerita dan mentransfer ilmu kearsipan yang kudapat dari diklat kepadanya. Karena seringnya aku bercerita tentang arsip, diam-diam suamiku telah memasukkan ke dalam program kerja di kantornya untuk pembenahan arsip. Arsip yang telah menumpuk dalam satu ruangan dalam

kardus-kardus bekas, tanpa daftar arsip dan pengap.

“Bagaimana program pembenahan arsip di kantor Ayah?” tanyaku ingin tahu.

“Alhamdulillah disetujui. Mau dibahas dalam rapat mendatang siapa saja timnya. Sudah beberapa unit terkait yang dikontak, antara lain bagian hukum dan bagian tata usaha. Mungkin setelah rapat akan dibuatkan surat permohonan bantuan pembenahan kepada Pusat Arsip Perguruan Tinggi.” katanya. “Setidaknya bisa dimulai dari unit kerja sendiri. Ini juga karena pengaruh bunda yang sering cerita arsip.” katanya tersenyum.

“Sudah hampir waktu ashar. Hujan pun telah berhenti. Saatnya membangunkan anak-anak, yah!” pintaku.

“Ok.” Suamiku beranjak menuju kamar anak-anak. Aku membereskan cangkir bekas kopi dan menuju dapur.

Tak pernah kusangka dalam hidupku aku akan mempelajari ilmu kearsipan. Tak pernah kusadari sedari lahir telah tercipta arsip tentangku. Saat aku tumbuh dan berkegiatan seperti sekolah, kursus, lomba, berobat ke rumah sakit, menikah, membeli rumah, punya anak dan kegiatan lainnya saat itu pula arsip tercipta, terutama arsip perseorangan. ANRI telah membuatku memahami kearsipan dan perlahan kutata arsip keluargaku setidaknya sesuai standar kearsipan. Arsip keluarga menyimpan cerita sejarah untuk diteruskan ke anak cucu, dari generasi ke generasi.

Sekelebat bayangan kota kelahirannya, Cirebon muncul. Aku menjadi teringat sesuatu tentang teman-teman arsiparis di Cirebon, teman diklatku. Satu tekadku, saling menguatkan dan memberi semangat untuk arsiparis, pengelola kearsipan dan pejabat kearsipan untuk membangun negeri di bidang kearsipan. Semangat!.

MENKES DIDAMPINGI KEPALA ANRI RESMIKAN RECORDS CENTER

Jakarta, ARSIP. Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek didampingi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan membuka dan meresmikan Gedung Pusat Arsip Kementerian Kesehatan di Kawasan Perkantoran dan Pergudangan Kementerian Kesehatan RI, Jl. Percetakan Negara II No 23. Gedung Pusat Arsip tersebut diberi nama Gedung dr. Soejoto, nama seorang tokoh yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang telah menanamkan dan menegakkan banyak hal mengenai administrasi di Kementerian Kesehatan.

“Luas bangunan adalah 900 meter persegi *Record Center* ini sudah mempunyai sarana dan prasarana seperti Ruang Publikasi, Ruang Pelayanan, Peminjaman Arsip, Ruang Administrasi, Ruang Sortir, Lemari Penyimpanan Arsip, Lemari Penyimpanan Arsip Vital”, terang Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo dalam laporan.

Records Center tersebut rencananya akan digunakan untuk menyimpan arsip inaktif di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Arsip yang tercipta sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan harus dikelola dengan efektif dan efisien sesuai dengan pedoman yang telah disusun. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan”, tutur Menkes dalam sambutannya.

Sementara itu Kepala ANRI Mustari Irawan, sangat mengapresiasi



Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek didampingi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan meresmikan Gedung Pusat Arsip Kementerian Kesehatan di Kawasan Perkantoran dan Pergudangan Kementerian Kesehatan RI, Jl. Percetakan Negara II No 23, Jakarta, 12 Januari 2018



Menteri Kesehatan Nila F Moeloek saat menandatangani prasasti peresmian Gedung dr. Soejoto sebagai Pusat Arsip Kementerian Kesehatan

atas berdirinya *Records Center* dan menyampaikan kepada seluruh undangan yang hadir bahwa Kemenkes sangat kosen terhadap penyelenggaraan kearsipan. Hal ini juga dibuktikan dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Kemenkes pada tahun lalu.

Setelah meresmikan Gedung *Records Center*, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek didampingi oleh Kepala ANRI Mustari Irawan beserta jajarannya meninjau langsung sarana dan prasarana yang ada di gedung *Records Center*. Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek berharap di tahun-tahun mendatang arsip-arsip inaktif Kemenkes secara rutin dapat dipindahkan ke ANRI sebagai arsip statis untuk diselamatkan dan dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan penelitian yang terkait dengan sektor kesehatan.

Pada kesempatan ini, Kepala ANRI juga menyerahkan sertifikat akreditasi A kepada Menkes yang telah menyelenggarakan kearsipan dengan sangat baik di lingkungan Kemenkes. (Is)

KEMENSETNEG SERAHKAN ARSIP KEPRESIDENAN KE ANRI

Jakarta, ARSIP. Menteri Sekretaris Negara Pratikno serahkan sejumlah arsip kepresidenan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan. Penyerahan arsip kepresidenan tersebut dilaksanakan di Gedung Utama Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018). Penyerahan arsip Kepresidenan tersebut sebagai tindak lanjut penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 11 Februari 2016 antara Mensesneg dan Kepala ANRI tentang kerja sama penyelenggaraan kearsipan, yang menghasilkan kegiatan asistensi penataan arsip Kemensetneg dan pembentukan Tim Bersama Arsip Kepresidenan.

Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, dalam laporannya menyampaikan bahwa Tim Bersama Arsip Kepresidenan telah berhasil menarik arsip Kepresidenan dari Istana Kepresidenan di Daerah berupa arsip foto kegiatan Presiden tahun 1954 s.d. 2014 dan buku tamu kenegaraan tahun 1982 s.d.1992 untuk diserahkan kepada ANRI. Selain arsip foto kegiatan Presiden dan buku tamu kenegaraan, Kemensetneg juga menyerahkan arsip Kepresidenan lainnya sebanyak 3914 berkas atau 481 boks. Arsip-arsip itu terdiri atas arsip Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) Hatta s.d. Kabinet Ampera Yang Disempurnakan/Dewan Menteri tahun 1949 s.d. 1968; Arsip Gerakan Non Blok tahun 1970 s.d. 1998; Arsip ASEAN tahun 1967 s.d. 1968; dan Arsip Sekretariat Wakil Presiden tahun 1999 s.d. 2004.

"Kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan sekaligus juga ini jadi kalau bapak butuh arsipnya, kami semoga arsip ini termanfaatkan secara baik. Kami memiliki kebutuhan yang sama. Kami mengucapkan terima



Menteri Sekretaris Negara Pratikno serahkan sejumlah arsip kepresidenan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan di Gedung Utama Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

kasih kita terus-menerus bersama-sama untuk menunjukkan kepada dunia tentang kepemimpinan kita di masyarakat internasional, terutama di Non Blok," ujar Partikno. Lebih lanjut Pratikno menambahkan bahwa penyerahan arsip statis ke ANRI telah rutin dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sementara itu, Kepala ANRI Mustari Irawan berterima kasih kepada Kemensetneg karena rutin menyerahkan arsip penting bernilai guna kesejarahan ke ANRI. Hal ini dapat patut dicontoh oleh lembaga pemerintah lainnya. "Saya kira ini suatu contoh yang baik sekali bagi kementerian dan lembaga negara lainnya untuk bisa menyerahkan arsip statisnya ke Arsip Nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan," tuturnya. Mustari menambahkan bahwa saat ini ANRI sedang menjalankan program penyelamatan arsip kepresidenan mulai dari Presiden pertama sampai kepada Presiden yang terakhir.

"Nanti saya kira arsip-arsip itu (Arsip Kepresidenan) ada di Sekretariat Negara yang paling banyak. Oleh karena itu kami sangat berkepentingan sekali dengan arsip yang ada di Sekretariat Negara ini untuk terus kita bekerja sama untuk menyelamatkan arsip-arsip ini," terangnya.

Pada kesempatan ini, Kepala ANRI sangat mengapresiasi kegiatan penyerahan Arsip Kepresidenan dan memberikan sertifikat Akreditasi A kepada Kemensetneg yang telah berupaya melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dengan sangat baik.

"Ini luar biasa juga karena telah mendapatkan Akreditasi A dari ANRI. Terima kasih atas pendampingannya dan kami berkontribusi terus untuk mendukung kebijakan nasional untuk menata arsip secara baik dan memperlihatkan ke bangsa dalam dan internasional untuk memahami dinamika pemerintahan kita," jelas Pratikno. (Is)

ANRI MENERIMA PROCUREMENT AWARD DARI KEMENKEU



Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pengarahannya pada acara Procurement Award di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 26 Februari 2018

Jakarta, ARSIP. Kementerian Keuangan memberikan *Procurement Award* sebagai bentuk apresiasi kepada sejumlah kementerian/ lembaga/institusi (K/L/I) yang sudah baik dalam menerapkan standardisasi nasional untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE.

ANRI salah satu instansi dari 15 instansi yang menerima Procurement Award dari Kementerian Keuangan, Sekretaris Utama ANRI Sumrahadi yang mewakili ANRI menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan juga diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPAATK, Otoritas



Sekretaris Utama ANRI Sumrahadi yang mewakili ANRI menerima Penghargaan pada acara Procurement Award

Jasa Keuangan, Perpustakaan Nasional, dan SKK Migas,

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengemukakan peran strategis kegiatan pengadaan barang/jasa akan berkontribusi dalam

memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Menteri juga berpesan untuk selalu mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan melalui LPSE Kemenkeu di unit kerjanya masing-masing.

Sejak pertama kali diterapkan pada 2008 hingga 2017, hasil efisiensi pengadaan oleh LPSE Kemenkeu mencapai Rp5,23 triliun (17,84%) dari total transaksi Rp31,6 triliun. Sementara itu, efisiensi pengadaan barang/jasa K/L/I yang bekerja sama dengan LPSE Kemenkeu dari 2012-2017 mencapai 24% dari pagu anggaran sebesar Rp22,05 Triliun. (Inh)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CANANGKAN GNSTA

Jakarta, ARSIP. Kepala ANRI dalam hal ini diwakili Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi menjadi pembicara pada acara pembinaan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jum'at (16/3/2018). Pada kesempatan tersebut Sumrahyadi bersama Menteri KLHK Siti Nurbaya menyaksikan penandatanganan komitmen setiap unit Eselon I Teknis dalam pengelolaan arsip serta mendukung Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA).

Menurut Sumrahyadi yang hadir sebagai pembicara menjelaskan terdapat dua jenis arsip yang sering dijumpai dalam keseharian birokrasi, yaitu: arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis terdiri dari arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif. Sementara arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip dan memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan. "Arsip adalah memori bangsa", ucap Sumrahyadi.

Sumrahyadi menyampaikan dari 34 kementerian di Indonesia yang bernilai baik hanya dua, yaitu Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ditambahkan Sumrahyadi, dari 33 (ketika penilaian) provinsi yang bernilai baik hanya dua, dan dari 500 kabupaten/kota yang bernilai baik hanya delapan. Atas dasar hasil akreditasi kearsipan tersebut Sumrahyadi menjelaskan perlu adanya sebuah gerakan untuk menyadarkan tentang pentingnya arsip yaitu Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan pemikirannya bahwa



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya dan Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi menyaksikan penandatanganan komitmen setiap unit Eselon I Teknis dalam pengelolaan arsip serta mendukung Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, 16 Maret 2018



Menteri LHK, Siti Nurbaya saat memberikan cinderamata kepada Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi

arsip adalah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses birokrasi. Sebagaimana 4 ciri penting birokrasi, salah satunya terkait arsip. Ciri penting tersebut yaitu urusan publik bukan pribadi; adanya rantai komando; *merit systems*; dan urusannya selalu terkait dengan *filing* (arsip) dan *writing*.

"Saya minta kepada pegawai KLHK untuk tertib arsip, Mari dukung Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA), tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada acara Pembinaan Pegawai dalam rangka Hari Bhakti Rimbawan Tahun 2018.

Pada acara pembinaan pegawai tersebut tampak hadir Menteri Kehutanan Kabinet Pembangunan IV, Djamaluddin Suryohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Indonesia Bersatu I, Rachmat Witoelar, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Boen M. Purnama, sesepuh kehutanan dan pimpinan BUMN Kehutanan. (Inh/Humas Anri).

KEMENTERIAN LUAR NEGERI SERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI

Jakarta, ARSIP. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyerahkan 22 boks arsip statis yang bernilai sejarah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Gedung Pancasila Jakarta, Kamis (22/3/2018). Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi yang pada kesempatan itu diwakili Sekretaris Jenderal Kemlu Mayerfes menyerahkan Arsip Statis Kemlu tersebut secara simbolis kepada Kepala ANRI Mustari Irawan.

Dalam acara itu terlihat hadir pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama di lingkungan ANRI dan Kemlu. Kemlu menyerahkan dua arsip penting yaitu arsip misi pampasan perang RI sebagai manifestasi dari perjanjian perdamaian dan persetujuan pampasan antara Indonesia dan Jepang tahun 1958 dari KBRI Tokyo; dan Arsip musibah jatuhnya pesawat terbang MATINIAIR yang mengangkut calon Jemaah haji Indonesia tahun 1974 dari KBRI Colombo.

Lebih lanjut menlu Retno L.P. Marsudi mengatakan penyerahan arsip ini penting dalam merekam sejarah diplomasi Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia.

Beliau menekankan arti penting arsip misi pampasan perang perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang pada tahun 1958. Pertama; arsip ini merupakan manifestasi konkret pengakuan penjajahan Jepang terhadap Indonesia bahwa penjajahan merupakan sebuah kesalahan sejarah sesuai dengan amanat konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kedua; perjanjian itu sendiri merupakan titik balik hubungan Indonesia dan Jepang dari permusuhan menjadi persahabatan, Presiden Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang hanya setelah ditandatanganinya perjanjian ini.



Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemlu Mayerfes dan Kepala ANRI Mustari Irawan menandatangani berita acara penyerahan Arsip Statis Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila Jakarta, 22 Maret 2018.

Ketiga; memberikan pelajaran bagi dunia bahwa masa lalu yang kelam tidak menghalangi potensi kerja sama kedepan. Semua Negara memiliki beban sejarah namun Indonesia dan Jepang berhasil mengesampingkan beban tersebut dan menatap masa depan bersama, saat ini Jepang merupakan salah satu sahabat dekat Indonesia.

Kepala ANRI Mustari Irawan berterima kasih karena Kemlu telah secara rutin menyerahkan arsip statisnya ke ANRI. "Saya kira ini adalah sebuah contoh yang baik sekali bagi kementerian dan lembaga negara lainnya untuk bisa menyerahkan arsip statis ke ANRI karena sesuai dengan amanah UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan," tutur Mustari. Dengan penyerahan arsip statis Kemlu ke ANRI ini membuktikan bahwa pengelolaan arsip di Kemlu sudah baik, karena jika pengelolaan arsipnya buruk tentu sangat sulit untuk menyerahkan arsip statisnya ke ANRI

karena harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu.

Menlu Retno Marsudi merasa bahagia atas penyerahan arsip yang telah dilakukan Kemlu kepada ANRI. Menurutnya, penyerahan arsip yang bernilai sejarah bukanlah yang pertama sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2014 dan 2015. "Kami mengapresiasi kerja pegawai arsiparis yang telah menemukan arsip bersejarah ini," ujar Menlu Retno.

Ia juga mengimbau kedepan Kemlu akan meningkatkan sistem pengarsipan perjalanan dan perjuangan diplomasi Indonesia termasuk melalui digitalisasi arsip agar sejarah diplomasi semakin terpelihara dengan baik.

Dalam kesempatan itu ANRI dan Kemlu saling bertukar cenderamata sebagai hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. (Inh/humasanri)

MENUJU BIROKRASI KELAS DUNIA, CPNS ANRI IKUTI PRESIDENTIAL LECTURE



Presiden Joko Widodo saat memberikan pembekalan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018

Jakarta, ARSIP. JAKARTA - Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi bersama CPNS ANRI menghadiri Presidential Lecture di Istora Senayan Jakarta. Acara tersebut dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta membuka perspektif Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar memahami tantangan tugas di era industri 4.0, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama lintas Kementerian/Lembaga menyelenggarakan acara Presidential Lecture bagi CPNS. Selain diisi oleh pembekalan dari Presiden, acara yang bertajuk 'Bersatu Dalam Harmoni

: Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024' tersebut, juga diperkaya oleh sesi *inspiring lecture* dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Gojek Nadiem Makarim, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief.

"Pembekalan langsung dari Bapak Presiden sangat berarti bagi para CPNS. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak birokrasi dan tulang punggung bangsa menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun 2024," ucap Menteri PANRB Asman Abnur saat menyampaikan laporan kepada Presiden pada acara Presidential Lecture bagi CPNS hasil seleksi CPNS

tahun 2017 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/03).

Dilaporkan Asman, formasi CPNS yang dibuka pada tahun 2017 sejumlah 37.138 di 62 kementerian/lembaga dan 1 provinsi dengan total pelamar mencapai 2,4 juta lebih. Artinya seluruh CPNS yang lolos seleksi ini adalah putra/putri bangsa terbaik dari yang terbaik. "Dari jumlah formasi tersebut, 34.167 adalah formasi umum, 2.310 formasi lulusan cumlaude, 168 formasi penyandang disabilitas, serta 493 formasi putra/putri Papua dan Papua Barat yang akan ditempatkan di lintas kementerian/lembaga," ucapnya.

Disampaikan, rekrutmen CPNS

merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memperbaiki kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi. “Karena itu, kita harus mempersiapkan modal SDM Aparatur yang berintegritas dan profesional, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa *hospitality* dan *entrepreneurship*, serta daya *networking*, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut. Itulah SMART ASN,” imbuhnya.

Dijelaskan juga, jumlah ASN saat ini mencapai 4,3 juta lebih, dengan komposisi terbanyak selain guru dan tenaga kesehatan, adalah jabatan pelaksana yang bersifat administratif, yaitu sebesar 1,6 juta atau sekitar 26 %. Komposisi ASN yang didominasi oleh jabatan administrasi umum cukup berat, karena tantangan era industri 4.0 menghendaki adanya spesialisasi keahlian. “Untuk itu, rekrutmen ASN tahun 2017 dan ke depan kami fokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai dengan *core business* instansi guna membidik berbagai sasaran Nawacita, serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” kata Asman.

Lebih lanjut Asman mengungkapkan bahwa, fokus perbaikan manajemen ASN untuk menyongsong era industri 4.0 harus komprehensif, mulai dari perencanaan, rekrutmen dan orientasi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi dan rotasi, sampai dengan purnabhakti.



Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ANRI berfoto bersama sesuai mengikuti acara Presidential Lecture di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018

Terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 yang sepenuhnya menggunakan sistem CAT, dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan jawaban kongkrit atas tantangan era industri 4.0. Sistem ini menjamin pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung bersih, transparan, objektif dan bebas dari KKN. Hasilnya pun dapat dilihat secara *realtime*. Kelulusan peserta sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan para peserta, bukan karena titipan atau praktek tidak terpuji lainnya.

Disampaikan juga bahwa, dalam hal peningkatan kapasitas ASN tersebut, Kementerian PANRB bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini tengah melakukan penyempurnaan sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

“Kami sedang mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis Human Capital Management melalui pengembangan

ASN Corporate University. Skema diklat terobosan ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti *e-learning*, *coaching*, *mentoring* dan *on the job training (OJT)*,” imbuh Asman.

Pada kesempatan tersebut, sebagai media untuk menegaskan tema ‘Bersatu Dalam Harmoni’, digelar pula permainan angklung kolosal yang melibatkan seluruh peserta. Kegiatan tersebut didokumentasikan di Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Penciptaan Rekor Dunia Memainkan Musik Angklung ASN Terbanyak Dengan Jumlah Peserta 5.000 ASN. (Inh)

ANRI TERUS TINGKATKAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh saat memberikan arahan mengenai penyelenggaraan reformasi birokrasi

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan ANRI. Acara sosialisasi dilaksanakan di Ruang Noerhadi Magetsari, ANRI, Ampera Raya, Jakarta (29/03). Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi dalam laporannya menyampaikan bahwa indeks pelaksanaan RB di lingkungan ANRI sejak tahun 2011-2017 terus mengalami kenaikan. pada tahun 2011, indeks pelaksanaan capaian RB ANRI tahun 2011 memperoleh nilai 53%, tahun 2014 meningkat mencapai 56,93 %, pada tahun 2015 naik menjadi 66,49%, sedangkan tahun 2016 memperoleh 72,04%. Sementara



Peserta internalisasi reformasi birokrasi di lingkungan ANRI

pada tahun 2017 indeks pelaksanaan RB ANRI, Sumrahyadi memprediksi berada dikisaran angka 75%.

Sementara itu, Kepala ANRI, Mustari Irawan sangat mengapresiasi atas capaian perubahan yang terjadi

di lingkungan ANRI. Namun demikian, Mustari menambahkan bahwa kenaikan indeks RB harus diimbangi dengan perubahan peningkatan kinerja pegawai ke arah yang lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini, hadir Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh yang menyampaikan bahwa reformasi birokrasi juga harus mengarah pada program kinerja berbasis *outcome*, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Is)

ANRI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEARSIPAN KEPADA BANK INDONESIA

Jakarta-ARSIP. Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan penghargaan kepada Bank Indonesia (BI) atas peranannya dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebagai upaya penyelamatan arsip statis bidang perbankan (09/04/2018).

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Apresiasi Kearsipan yang merupakan salah satu bentuk dukungan BI terhadap GNSTA yang telah diinisiasi oleh ANRI dan dicanangkan oleh Kementerian PANRB. Hadir juga dalam acara tersebut Pejabat Tinggi Madya ANRI.

“Acara ini sangat penting untuk menyakinkan kepada kita bahwa arsip memang penting untuk kesinambungan bangsa dan negara sebagai identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memori acuan dan pertanggung jawaban”, tutur Mustari Irawan.

Lebih lanjut Kepala ANRI mengatakan, Penyelenggaraan kearsipan di BI tidak lepas dari penilaian ANRI. ANRI telah melakukan *Assesment* tidak hanya di satuan kerja kantor pusat BI namun juga di beberapa kantor perwakilan dalam negeri BI seperti perwakilan di Denpasar, Padang dan Bandung, hasilnya memang luar biasa yaitu konsisten baik di kantor pusat maupun perwakilan.

Pada tahun 2014 ANRI memberikan penghargaan kepada BI atas kinerja yang luar biasa dalam pelaksanaan alih media dokumen pengawasan perbankan yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kemudian Tahun 2016 BI menerima ANRI Award sebagai unit kearsipan terbaik nasional non kementerian.

Dengan konsisten BI mengelola fisik dokumen atau arsip pengawasan perbankan yang sampai saat ini tersimpan dan terpelihara dengan baik di ruang sentral khasanah arsip yang pengelolaannya telah terakreditasi oleh ANRI.

Kedepan ANRI sangat berharap capaian BI dalam penyelenggaraan



Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan penghargaan kepada Bank Indonesia (BI) yang diterima oleh Deputi Gubernur BI, Sugeng, atas peranannya dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebagai upaya penyelamatan arsip statis bidang perbankan (09/04/2018).

kearsipan dapat ditingkatkan terus dengan melakukan kerja sama yang erat dan sinergi dengan ANRI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Harapan ANRI kepada lembaga dan institusi lain kiranya dapat belajar dari BI untuk mengembangkan penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik dan secara bersama-sama mewujudkan gerakan GNSTA, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa setiap Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan, dan Perseorangan wajib mengelola arsip dengan baik dalam kerangka mempertahankan NKRI, tutur Kepala ANRI.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, tidak sedikit dokumen yang dibutuhkan dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berhubungan dengan perekonomian. “Keberadaan dokumen menjadi sumber informasi dan menjadi bukti otentik maka perlu dikelola dan dilestarikan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, arsip yang

baik merupakan pilar kredibilitas dan akuntabilitas suatu institusi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian arsip perlu dilakukan dengan konsisten dan baik agar jejak langkah institusi dalam membangun kinerja dapat diabadikan, diwariskan serta dijadikan landasan berpijak yang kuat untuk mewujudkan visinya.

Menteri PANRB, Asman Abnur menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan kearsipan. Bahkan sejak tahun 2017, pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). “Hari ini dapat kita saksikan bagaimana Bank Indonesia dengan sungguh-sungguh mengelola arsipnya dengan baik,” ujarnya, seraya berharap Bank Indonesia dapat dijadikan pusat studi tiru untuk instansi pemerintah lainnya.

Seusai penerimaan penghargaan, BI juga menggelar diskusi dengan tema Peranan Arsip dalam Mendukung Kesinambungan Bangsa dan Negara. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yaitu Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Kepala ANRI Mustari Irawan, dan Suzanna G. Hamboer, Kepala Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas BI.(Inh/Humas)

KEPALA ANRI MENERIMA SERTIFIKAT MEMORY OF THE WORLD



Jakarta-ARSIP. Kepala ANRI Mustari Irawan didampingi para Pimpinan Tinggi Madya, menghadiri acara penyerahan sertifikat Memory of the World untuk Arsip Tsunami, Restorasi Borobudur, dan Cerita Panji.

Pada kegiatan tersebut juga turut hadir Presiden Republik Indonesia yang ke-5 Megawati Soekarno Putri yang diundang untuk membuka pameran arsip yang bertemakan Peringatan 63 Tahun KAA.

Penyerahan sertifikat MOW yang telah kita terima oleh lembaga pengusul, dalam hal ini Perpustakaan Nasional, Balai Konservasi Borobudur, Kementerian Pendidikan dan



Kebudayaan, dan Kementerian Luar Negeri, dapat diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelamatan dan pelestarian arsip, Memory of the World yang didokumentasikan sebagai suatu warisan bersejarah dapat memperlihatkan kembali

sejumlah keunikan warisan budaya dunia, sehingga kita bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Selama ini banyaknya pengajuan yang di sampaikan oleh negara di seluruh dunia kepada UNESCO untuk mendapat pengakuan dari dunia, dalam hal ini Indonesia dapat memperoleh sertifikat MoW yang didambakan selama ini serta memperoleh pengakuan dunia dan juga merupakan bagian dari menyelamatkan memori kolektif bangsa yang tentunya dapat di manfaatkan dalam bidang penelitian dan juga bidang pendidikan.

HARI KEARSIPAN KE-47 USUNG SLOGAN “ARSIP YES HOAKS NO”

NTT-ARSIP. Peringatan Hari Kearsipan Nasional (HKN) ke-47 resmi dibuka. HKN ke-47 Tahun 2018 dibuka oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, dan Kepala ANRI, Mustari Irawan di Hotel Swiss-Bell Inn, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pelaksanaan Peringatan HKN ke-47 tahun 2018 diisi dengan berbagai kegiatan antara lain Rapat Koordinasi Kearsipan tingkat Nasional tentang Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis TIK (e-Arsip), Penganjangan GNSTA, Penyerahan Arsip Statis dari Pencipta Arsip ke Lembaga Kearsipan tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, penyerahan Citra Daerah dari ANRI kepada perwakilan pemerintah daerah dan pameran arsip Wawasan Kebangsaan”, terang Kepala ANRI, Mustari Irawan dalam laporannya.

Rini Widyantini dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga dan menyelamatkan arsip dengan basis teknologi informasi dan komunikasi. “Kebesaran suatu bangsa tergantung pada bagaimana kita menata arsip. Tidak ada cara lain, kita harus menjaga dan menyelamatkan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya adalah dengan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis sebagai awal bagi elektronisasi pengelolaan kearsipan (filling),” ungkap Rini.

Sementara itu, Gubernur



Peringatan Hari Kearsipan Nasional (HKN) ke-47 dibuka oleh Menteri PAN dan RB yang diwakili oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Kepala ANRI Mustari Irawan dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Hotel Swiss-Bell Inn, Kupang, NTT (15/5)

NTT, Frans Lebu Raya sangat mengapresiasi kegiatan Peringatan Hari Kearsipan Ke-47 di NTT dan mengucapkan terima kasih karena NTT telah diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah Peringatan HKN Ke-47.

Rangkaian Peringatan Hari Kearsipan (HK) ke-47 yang dibuka di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14-16 Mei 2018 diakhiri dengan pelaksanaan upacara bendera di ANRI pada tanggal 18 Mei 2018 yang diikuti oleh seluruh pegawai ANRI.

Bertindak sebagai inspektur upacara HK Ke-47, Kepala ANRI Mustari Irawan. Dalam sambutannya Kepala ANRI menyampaikan bahwa peran strategis arsip akhirnya berkontribusi dalam membantu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai

cita-cita nasional.

Dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 17 Agustus 2016 yang lalu, semakin menguatkan langkah kita untuk mewujudkan tertib arsip secara nasional. Mustari Irawan juga menyampaikan harapannya terhadap penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. “Diharapkan agar seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/kota, PTN, BUMN/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan untuk segera mencanangkan dan melaksanakan GNSTA di lingkungan instansi masing-masing sehingga harapan “Tertib Arsip Cermin Budaya Bangsa” dapat terwujud” ungkap Mustari Irawan. (ke/ls)

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA DAN PAMERAN ARSIP UNTUKMU PANCASILAKU KAMI BERBAGI, BERSATU, BERPRESTASI

Jakarta-ARSIP. Presiden RI. Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan dan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya ANRI turut menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut. Inimerupakan kali kedua upacara peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan. Tahun lalu di tempat yang sama.

Pada kesempatan yang sama ANRI bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengadakan Pameran Arsip Foto di Gedung Pancasila.

Setelah upacara, dengan dipandu Kepala ANRI Mustari Irawan, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dan Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono, meninjau Pameran Arsip Foto "Untukmu Pancasila Kami Berbagi Bersatu, Berprestasi" di Foyer Gedung Pancasila.

Dalam amanatnya saat upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk terus mengamalkan warisan mulia para pendiri bangsa ini untuk kemajuan bangsa dan menjadikan hal itu sebagai sumbangsih Indonesia kepada masyarakat dunia. Sebab, menurutnya, negara manapun di dunia ini pada akhirnya akan selalu berproses menjadi masyarakat yang bhineka dan majemuk sebagaimana bangsa Indonesia sejak dulu.

"Saatnya kita berbagi pengalaman dalam berbhinneka tunggal ika, dalam bertoleransi, serta dalam membangun persatuan dan kebersamaan. Saatnya kita berbagi pengalaman



Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Kepala ANRI Mustari Irawan meninjau Pameran Arsip Foto "Untukmu Pancasila Kami Berbagi, Bersatu, Berprestasi" di Gedung Pancasila, Jakarta (01/06)

dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujarnya.

Atas nama seluruh rakyat Indonesia, Presiden menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pendiri bangsa atas warisan luhur mereka untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila yang bisa kita nikmati saat ini.

"Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada

generasi-generasi muda berikutnya yang telah menanamkan pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," imbuhnya.

Di penghujung amanat, Presiden terus mengajak para ulama, tokoh agama, guru, politisi, aparat pemerintahan, pekerja, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam keseharian kita.

"Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita bersatu, kita berbagi, kita berprestasi," tutupnya. (lh)

TELUSURI JEJAK FAKTA SEJARAH 73 TAHUN PANCASILA



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerjasama dengan PT Indonesia (Persero) melaksanakan Pameran Arsip Otentik Pidato M. Yamin 5 Juni 1958, Peluncuran Prangko Bung Karno di Sidang BPUPK dan Sampul Hari Pertama Peringatan 73 Tahun Lahirnya Pancasila serta meluncurkan buku yang bertajuk "Tjamkan Pantja Sila!" di Gedung Filateli Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Jakarta-ARSIP. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Ir Sukarno kala itu menyampaikan sebuah pidato. Pidato tersebut merupakan penyampaian pertama kali ajaran, nilai dan prinsip Pancasila sebagai dasar bagi Indonesia Merdeka. Pidato ini kemudian disebut sebagai 'Pidato Lahirnya Pancasila'. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Tahun ini, tepatnya 1 Juni 2018 adalah 73 tahun Pancasila. Sebagai wujud penghormatan atas jasa para pahlawan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerjasama dengan PT Indonesia (Persero) melaksanakan Pameran Arsip Otentik Pidato M. Yamin 5 Juni 1958, Peluncuran Prangko Bung Karno di Sidang BPUPK

dan Sampul Hari Pertama Peringatan 73 Tahun Lahirnya Pancasila serta meluncurkan buku yang bertajuk "Tjamkan Pantja Sila!" di Gedung Filateli Jakarta, Kamis (31/5/2018).

"Bersama-sama dengan Pos Indonesia, serta komunitas Jas Merah, kami menyeleenggarakan pameran arsip yang banyak sekali. Ini merupakan harta karun yang tidak terkira," tambah Kepala ANRI, Mustari Irawan saat pembukaan acara Peringatan 73 Tahun Lahirnya Pancasila di Gedung Filateli Jakarta.

Ada beberapa arsip foto koleksi ANRI yang dipajang dalam pameran tersebut seperti foto pembangunan Tugu Monas, foto Sidang BPUPKI, serta foto pidato Ir. Sukarno saat Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945.

"Dalam memperingati Hari Lahirnya Pancasila, kali ini Pos Indonesia

berperan dalam meluncurkan Prangko dan Sampul Peringatan 73 Tahun Pancasila. Kegiatan ini sangat positif dan mudah-mudahan ini akan berlanjut dalam kolaborasi pada masa-masa selanjutnya," papar Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi W. Setijono,

Selain dihadiri oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan Direktur Pos Indonesia, Gilarsi W. Setijono acara ini juga dihadiri oleh Tokoh-Tokoh Nasional seperti Presiden Republik Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, dan Yudi Latif serta Duta Arsip Rieke Diah Pitaloka.

Acara Pameran Arsip Otentik Pidato M. Yamin dibuka untuk umum dan menyediakan 100 buku serta 100 prangko bagi 100 pengunjung pertama. dan akan digelar hingga 4 Juni 2018 mendatang. (lh)

HASIL PEMERIKSAAN BPK, ANRI PEROLEH WTP



Sejumlah 38 Kementerian/Lembaga di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK) tahun 2017, di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta (5/6).

Jakarta-ARSIP. Sejumlah 38 Kementerian/Lembaga di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK) Tahun 2017, di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta (5/6).

LHP diserahkan oleh Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III, Blucer W. Rajagukguk, kepada setiap pimpinan Kementerian/Lembaga. Dalam sambutannya, Anggota III BPK menyatakan bahwa BPK sangat mengapresiasi kementerian/lembaga yang mengalami perbaikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 38 kementerian/lembaga tersebut, tidak ada yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*) pada tahun 2017.

"Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan *mindset* "mencari salah". Yang dilakukan auditor adalah meng-*confirm* kebenaran, bahwa apa



Kepala ANRI Mustari Irawan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan (LK) ANRI tahun 2017 dari BPK RI

yang dilakukan kementerian/ lembaga tersebut sudah benar atau tidak, dan lakukan uji kebenaran. Bila salah diberitahu dimana kesalahannya", tegas Anggota III BPK.

Sementara itu, Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) ANRI Tahun 2017, diterima oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan ANRI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Is)